


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

14 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Diversifikasi Pangan Lokal Cara Paling Ampuh Atasi Kemiskinan Lintas Generasi	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Ers/YK/SB/E-9	

Pengentasan Kemiskinan | Petani Sering Jadi Korban, Marjin Mereka Banyak Digerus Pedagang

Diversifikasi Pangan Lokal Cara Paling Ampuh Atasi Kemiskinan Lintas Generasi

» Petani dan nelayan selalu menjadi korban kebijakan pangan dan pada akhirnya mereka mewariskan kemiskinan lintas generasi.

JAKARTA – Keberagaman sumber pangan lokal yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air jika diolah dan dimanfaatkan secara optimal akan memberi keuntungan secara ekonomi kepada masyarakat. Dengan mendiversifikasi sektor pertanian diyakini sebagai cara paling ampuh untuk mengatasi kemiskinan lintas generasi.

Guru Besar Ilmu Teknologi Pemrosesan Bahan Pangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Lienda Aliwarga Handono, mengatakan masyarakat harus dilatih dan dididik agar bisa mengolah sumber-sumber pangan lokal di wilayahnya menjadi produk bernilai tinggi.

"Di daerah produsen sagu, misalnya, masyarakat bisa dilatih menghasilkan produk lain selain tepung sagu, seperti mi yang *gluten free*," kata Lienda kepada *Koran Jakarta*, Kamis (13/6).

Selain sagu, tanaman jenis lain seperti cokelat juga bisa diolah. Masyarakat dapat dilatih untuk memfermentasi biji cokelatnya sebelum dijual karena harga jual biji cokelat terfermentasi jauh lebih tinggi dari pada yang tidak difermentasi.

Pilihan lainnya, kata Lienda, bisa dengan menaikkan produktivitas susu sapi perah dengan pemberian pakan yang baik. Saat ini, produktivitas sapi perah sangat rendah sehingga sebagian besar kebutuhan domestik harus ditutup oleh

Sejumlah Komoditas Pangan Indonesia

No	Komoditas	Produksi (juta ton)		Perubahan
		2022	2023	
1	Padi	54,75	53,98	-1,4%
2	Jagung	16,53	14,46	-12,5%
3	Ubi Jalar	1,51	1,43	-5,3%
4	Kedelai	0,22	0,34	54,5%
5	Kacang Tanah	0,38	0,35	-7,9%
6	Ayam Ras	3,67	3,99	8,7%
7	Daging Sapi	0,37	0,38	2,7%

Sumber: Kementerian Pertanian, BPS

impor.

"Kerja sama dengan para pemangku kepentingan sangat penting. Perguruan tinggi dapat mendukung dari segi teknologi, pemerintah dari segi regulasi, dukungan dari lembaga keuangan untuk program pelatihan, kredit, dan akses ke *market*, agar produk yang dihasilkan dapat terserap pasar dan bergulir," terang Lienda.

Sebetulnya, papar Lienda, banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi, termasuk mengurangi *food loss* saat pascapanen di tingkat petani, yang menurut organisasi pangan dunia (FAO) bisa mencapai 40 persen.

"Kerugian ekonomi akibat *food loss* dan *food waste* di Indonesia sekitar 213-551 triliun rupiah per tahun menurut data FAO, 2022. Dengan penanganan yang baik maka produk pascapanen tidak akan banyak yang rusak," katanya.

Pada kesempatan lain, peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengkritik keras pertumbuhan ekonomi saat ini yang lebih banyak ditopang sektor jasa terutama perdagangan, bukan produk pertanian yang memiliki nilai tambah.

Menurutnya, langkah paling tepat mengatasi masalah kemiskinan spasial yakni dengan memperkuat sektor pertanian perikanan dan perkebunan.

"Itu yang paling penting. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan berbasis rakyat harus direvitalisasi dengan penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan di kalangan petani, nelayan dan pekebun," tegas Hafidz.

Peran koperasi, penyuluh pertanian, dan perikanan harus dimodernisasi dengan sistem analisis yang lebih canggih dan terkoneksi dengan *big data* pemerintah dan industri agar *supply and demand*-nya membaik dan kebijakan di sektor tersebut menjadi lebih rasional.

"Kalau tidak, maka terobosan apa pun akan sulit dilakukan. Petani dan nelayan selalu menjadi korban dari kebijakan pangan dan perikanan, dan pada akhirnya mereka mewariskan kemiskinan lintas generasi," pungkas Hafidz.

Teknologi Pangan

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, sepakat dengan pengembangan pangan lokal akan berkontribusi penting bagi pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan. Masyarakat desa, kata Dwijono, akan ikut dalam rantai produksi pengembangan pangan lokal sehingga mendapat pema-

sukan lebih.

"Minimal sumber karbondioksida mereka pun jadi beragam, tidak tergantung pada beras dan gandum yang harganya terus naik," kata Dwijono.

Agar benar-benar berkembang, Dwijono menekankan pentingnya pangan lokal untuk bisa menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen terbesar pangan saat ini yakni warga perkotaan. Untuk itu, diperlukan teknologi pangan yang mengolah bahan pangan lokal menjadi praktis dan bergengsi.

"Jadi bisa dibuat menjadi praktis dalam penyajian tanpa merusak rasa. Ini tentu sangat memerlukan teknologi pangan. Kuncinya menyesuaikan dengan lidah konsumen," tandas Dwijono.

Sementara itu, Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan untuk memutus mata rantai kemiskinan, pemerintah perlu memperkuat pertanian karena sektor ini menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat.


"Paling awal memperkuat pelaku utama, petani itu sendiri. Sering kali mereka menjadi korban subordinasi yang membuat keuntungan petani yang tidak seberapa, justru harus tergerus oleh pedagang perantara, tengkulak atau pengijon. Padahal, mereka tetap butuh modal," kata Bagong.

Dengan membantu permodalan petani, maka mereka tidak *bargaining* harga jual komoditas yang selama ini harus pasrah pada pihak-pihak tersebut. Hal itu tentu akan meningkatkan pembagian margin keuntungan yang lebih berpihak kepada petani lokal.

■ ers/YK/SB/E-9

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	Temuan Zat Berbahaya pada Makanan	
Date	14 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	2	
Author	Daniel R	

Temuan Zat Berbahaya pada Makanan

MASYARAKAT mendukung langkah Pemerintah Kota Jakarta Barat menindaklanjuti temuan zat berbahaya pada makanan yang dijual di Kota Tua dengan menginstruksikan kepada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) untuk rutin melakukan pengawasan.

Sebelumnya tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta menemukan kandungan zat berbahaya berupa formalin dan boraks pada makanan yang dijual di Kota Tua dalam sidak pada Rabu (12/6).

Ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Namun, Sudin KPKP harus rutin melakukan pengawasan terkait temuan zat berbahaya pada makanan dan jajanan yang ada di Jakarta Barat, khususnya di Kota Tua.

Pengawasan makanan atau minuman tersebut semakin urgen menimbang Kota Tua menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Jakarta ataupun dari luar.

Apalagi di situ kan banyak wisatawan ya, dari Jakarta atau dari luar juga.

Sebelumnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta menemukan sejumlah zat berbahaya seperti formalin dan boraks.

BBPOM menguji total 63 sampel makanan serta minuman dan menemukan tiga jenis makanan yang mengandung formalin dan boraks. Makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut adalah mi kuning (formalin) dan kerupuk gendar (boraks).

Daniel R,
Tamansari, Jakarta Barat

Title	ARUS DERAS BANSOS BERAS
Date	14 Juni 2024
Media	Bisnis Indonesia
Page	17
Author	Dwi Rachmawati



Warga antri untuk mendapatkan bantuan pangan beras atau bansos beras di Kantor Kelurahan Rawajati, Jakarta. Pemerintah memastikan program bantuan sosial pangan beras akan berlanjut pada pemerintahan selanjutnya.

| PROGRAM PANGAN PEMERINTAH |

ARUS DERAS BANSOS BERAS

Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui bantuan pangan menjadi perhatian utama pemerintah. Bantuan sosial beras dipastikan berlanjut hingga tahun depan.

Dwi Rachmawati
dwi.rachmawati@bisnis.com

Kondisi itu membuat proses pemberian bantuan sosial (bansos) beras bakal dilakukan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran dijadwalkan mengucap sumpah sebagai Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Demi kelancaran program bansos beras yang berkelanjutan di masa pemerintahan baru, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah lebih dahulu mengajukan tambahan anggaran belanja 2025 sekitar Rp20,8 triliun, termasuk program bantuan pangan beras atau bansos beras yang mencapai Rp20,2 triliun.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa alokasi anggaran Bapanas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp329,9 miliar atau 25,4% lebih rendah dari pada pagu anggaran 2024. Oleh karena itu, perlu tambahan anggaran belanja pada 2025.

Dia mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp589,59 miliar diperlukan

untuk kebutuhan kegiatan regulasi Bapanas pada 2025. Arief memerinci sebanyak Rp155,9 miliar untuk kegiatan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan; Rp185,19 miliar untuk pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi; Rp212,85 miliar untuk pemantapan keanekaragaman konsumsi pangan; serta Rp35,93 miliar untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Selain itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,22 triliun untuk kebutuhan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) termasuk di dalamnya program bantuan pangan.

"Kami juga mengusulkan anggaran tambahan untuk penyaluran CPP sebesar Rp20,22 triliun," katanya, Senin (10/6).

Dalam paparannya, Bapanas membutuhkan anggaran sekitar Rp16,68 triliun untuk program bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025.

Arief menjelaskan program bantuan pangan beras masih diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan beras di 68 daerah yang terindikasi rentan pangan.

Sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) harus diselamatkan lewat bantuan pangan beras.

"Apakah masih perlu [memberikan bantuan pangan]? Ya perlu, 22 juta KPM itu harus diselamatkan, minimal bisa makan dan itu adalah beras," ujarnya.

Dia pun membantah bantuan pangan beras hanya dilakukan saat pemilihan umum (Pemilu) saja. Program bantuan beras telah dilakukan sejak periode pemerintahan terdahulu dengan nama yang berbeda-beda, seperti Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Beras Sejahtera (Rastra), hingga bantuan pangan.

Arief pun menegaskan, program bantuan pangan beras menjadi upaya pemerintah menciptakan ekosistem pangan yang lebih baik dari hulu hingga hilir. Bulog akan lebih mudah dalam melakukan fungsinya untuk menyerap dan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

Adapun, kata Arief, untuk menjalankan program bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM dibutuhkan anggaran sekitar Rp3 triliun per bulan dengan penyaluran 220.000 ton beras. Artinya, untuk menjalankan program bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun.

"Tetapi kita akan tergantung pada postur anggaran [APBN]," ujarnya.

Akan tetapi, jejak pemerintahan Jokowi lengser, pemerintah justru mengurangi jatah bansos beras dari yang awalnya sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

Presiden Jokowi telah menyetujui bantuan beras akan kembali digulirkan setelah pembagian tahap kedua berakhir pada Juni 2024.

Pemberian bansos beras akan dibagikan sebanyak 10 kilogram pada Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Adapun, Arief mengatakan perubahan skema penyaluran bantuan beras menjadi dua bulan sekali dilakukan dengan



Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat berpidato di kantor Komisi Pemilihan Umum. Sejumlah program utama pemerintahan mulai diumumkan oleh pasangan itu.

“
Kami juga mengusulkan anggaran tambahan untuk penyaluran CPP sebesar Rp20,22 triliun.

mempertimbangkan kondisi fiskal APBN. Kendati demikian, bantuan beras tetap akan efektif menahan laju inflasi pangan akibat harga beras.

GENJOT SERAPAN
Di sisi lain, Perum Bulog bakal melakukan pengadaan beras dari dalam negeri pada tahun ini bisa mencapai lebih dari satu juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, menyebut total stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton.

Adapun, sebanyak 688.877 ton beras di antaranya berasal dari penyerapan dari dalam negeri selama Januari hingga awal Juni 2024.

"Pengadaan dalam negeri sampai dengan minggu lalu sebanyak 688.877 ton setara beras, ini kurang lebih 110% dari target panen raya 2024," kata Bayu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (10/6).

Bayu pun menargetkan pengadaan beras dari dalam negeri hingga akhir tahun ini bisa melampaui 1 juta ton, seperti yang terjadi pada 2023 dan lebih tinggi dari 2022.


Dalam paparannya, penyerapan beras dari dalam negeri oleh Bulog pada 2023 tercatat sebanyak 1,06 juta ton, sementara pada 2022 penyerapan beras dari dalam negeri hanya 994.651 ton.

Selain itu pada 2021 penyerapan beras lokal mencapai 1,21 juta ton, dan 2020 sebanyak 1,25 juta ton.

Kendati begitu, Bayu mengakui bahwa penyerapan beras total stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton.



Warga menerima bantuan pangan beras di Desa Sukaraja, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Title	PASAR HEWAN JONGGOL	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Antara/Yulius Satria Wijaya	


■ PASAR HEWAN JONGGOL



Antara/Yulius Satria Wijaya

Foto udara suasana Pasar Hewan Jonggol jelang Iduladha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/6). Sepekan jelang Iduladha, pasar yang beroperasi sejak

1969 dan menjadi salah satu pasar hewan terbesar di Jabodetabek tersebut menyediakan sapi sebanyak 900 ekor, dan domba atau kambing sebanyak 700 ekor.

Title	Stok Melimpah Beras Sumsel	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	K64	

| BAHAN PANGAN |

Stok Melimpah Beras Sumsel

Bisnis, PALEMBANG — Keseluruhan stok beras yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersial di Sumatra Selatan pada saat ini masih cukup melimpah. Bahkan, dapat memenuhi kebutuhan hingga masa panen pada tahun depan.

Data Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung menunjukkan bahwa total stok beras yang tersedia di seluruh gudang saat ini mencapai 54.625 ton.

Pimpinan Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Elis Nurhayati mengatakan bahwa keseluruhan stok itu ditunjukkan untuk CBP dan beras komersial yang dapat memenuhi kebutuhan bagi dua provinsi, Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung.

Bahkan, dia mengklaim bahwa stok tersebut dapat memenuhi kebutuhan kedua provinsi itu sampai dengan masa panen berikutnya.

“Dengan stok 54.625 ton, ketahanan [beras] kami bisa sampai masa panen berikutnya pada 2025,” katanya, Kamis (13/6).

Elis menjelaskan bahwa sesuai dengan penugasan yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyaluran beras dibagi menjadi dua, yaitu program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta beras untuk bantuan pangan.

Menurutnya, untuk penyaluran SPHP periode Januari hingga Juni 2024 telah terealisasi sebesar 61,11% atau mencapai 27.073 ton dari total target untuk wilayah Sumsel.

“Untuk target penyaluran

SPHP di wilayah Sumsel dan Babel tahun ini kita ditetapkan sebanyak 44.300 ton,” katanya.

Sementara itu, imbuhnya, penyaluran beras untuk program bantuan pangan telah dilakukan mulai dari Januari hingga Mei 2024. Program ini akan dilanjutkan untuk alokasi Juni hingga akhir 2024.

Dia menambahkan bahwa jumlah beras yang digelontorkan dalam satu kali penyaluran bantuan pangan per bulan, yaitu sebanyak 6.191 ton untuk Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Dan untuk penerima bantuan pangan beras itu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bapanas berdasarkan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem [P3KE],” katanya. (K64)

Title	YANG DATANG DAN PERGI TERIMBAS ADOPSI AI	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	19	
Author	Rika Anggraeni	

| KECERDASAN BUATAN |

YANG DATANG DAN PERGI TERIMBAS ADOPSI AI

Dalam 5 tahun—10 tahun mendatang, bakal tercipta banyak profesi baru sebagai dampak perkembangan kecerdasan buatan yang telah menghapus puluhan juta pekerjaan lama.

Rika Anggraeni
rika.anggraeni@bisnis.com

Nasib Generasi Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 tampaknya tidak semujur generasi sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 9,9 juta generasi (gen) Z di Indonesia pada rentang usia 15 tahun—24 tahun tidak bekerja alias menganggur.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Agustus 2023, sekitar 22,25% dari 44,7 juta anak muda golongan gen Z tidak bekerja, menjalani pendidikan dan mendapat pelatihan, atau *not in employment, education, and training* (NEET).

Dalam terminologi BPS, NEET adalah penduduk usia muda dengan rentang usia 15 tahun—24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan.

Sayangnya, beban yang dipikul gen Z ternyata tambah mengungung. Data World Economic Forum Report & LinkedIn (2023) mengungkap sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang dalam 5 tahun mendatang, terimbas perkembangan kecerdasan buatan alias *artificial intelligence* (AI).

Peringatan tentang hal itu juga sudah diungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa perkembangan AI bisa memicu tren pergeseran kemampuan dan pekerjaan, termasuk membuat jutaan pekerjaan hilang akibat teknologi AI.

"Jadi memang inilah dilema dari kemajuan teknologi, tetapi kita harus optimis," katanya dalam acara Google AI untuk Indonesia Emas 2045 belum lama ini.

Sikap optimistis yang disampaikan Menkominfo memang berlawanan. Budi menjelaskan bahwa AI juga bisa memunculkan 69 juta pekerjaan baru.

Dia menyebutkan sebanyak 22,1% total pekerja Indonesia memanfaatkan AI dan 26,7 juta pekerja terbantu oleh AI. "Nanti ada pekerjaan yang hilang, tetapi akan ada pekerjaan baru muncul," kata Budi.

Oleh karena itu, Indonesia harus tetap beradaptasi dengan kehadiran teknologi AI, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. "Yang penting dari AI adalah tidak *against people and humanity*,

manusia dan kemanusiaan. Itu yang harus kita jaga," tuturnya.

Akan tetapi, Budi menyampaikan bahwa masyarakat juga perlu memprioritaskan pelatihan berbasis keterampilan dengan mempertimbangkan kebutuhan industri yang bertumpu pada AI. Selain itu, masyarakat juga harus mengikuti pelatihan platform pembelajaran *online*, *workshop*, dan inisiatif kolaborasi

antara lembaga pendidikan dan industri.

Ketua Bidang Regulasi Pemesertuhan Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) Ardian Asmar memperkirakan AI bisa menggantikan peran manusia seperti pekerjaan analisis. Alasannya, AI akan membuat perencanaan makin lebih baik dan efisien. Namun, Ardian menegaskan teknologi AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia. Dia menambahkan bahwa terdapat sektor pekerjaan tertentu yang tidak akan tergantikan AI, seperti kontraktor.

"AI itu akan berperan misalnya di analisis data, itu mungkin akan tergantikan, tetapi tidak akan tergantikan 100%, karena basis AI adalah data dan algoritma," kata Ardian.

Akan tetapi, Ardian tidak membantah bahwa teknologi AI makin berkembang maju. Terlebih, 60% populasi Indonesia merupakan usia produktif, sehingga dibutuhkan akses pendidikan yang memadai untuk meningkatkan teknologi AI.

"60% kalau kita berikan akses pendidikan yang memadai, itu akan menjadi masalah populasi kalau akses pendidikan

tidak diatasi. Kuncinya generasi ini bisa jadi generasi emas," ujarnya.

PERGESERAN PEKERJAAN
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi juga berpendapat bahwa ada pergeseran pekerjaan AI. Pergeseran itu, lanjutnya, akan makin terasa dalam 3–5 tahun ke depan karena porsi yang makin besar.

"AI ini memang diam-diam akan menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, seperti analisis, tenaga administrasi, bahkan didukung oleh robotika atau otomatisasi maka pekerja pabrik juga akan bisa dipangkas," kata Heru kepada *Bisnis*.

Saat ini, AI baru dalam tahap pengenalan di Indonesia sehingga dampak terhadap tenaga kerja belum terlihat. "Dalam waktu 5 tahun baru akan kelihatan bagaimana banyak pekerjaan dilakukan dengan AI," ujarnya.

Untuk itu, Heru menyebutkan harus ada upaya peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) ke digital, termasuk pengendalian AI.

"Kita jangan hanya senang hadimya AI, tapi tenaga kerja kita tidak di-upgrade, reskilling pun up skilling," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa AI merupakan *game-changer* penting bagi banyak sektor.

Sigit melihat banyak pekerjaan yang lebih cepat dan produktif dengan bantuan AI atau AI assisted, dan sebagian pekerjaan mungkin bahkan tergantikan oleh AI itu sendiri.



AI ini memang diam-diam akan menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, seperti analisis, tenaga administrasi, bahkan didukung oleh robotika atau otomatisasi maka pekerja pabrik juga akan bisa dipangkas.

"Sektor yang lebih didukung infrastruktur TIK, seperti telekomunikasi, TIK, banking, hingga mining kemungkinan lebih cepat dan luas mengadopsi AI. Sektor lain seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan mungkin lebih sedikit adopsinya," ujar Sigit kepada *Bisnis*.

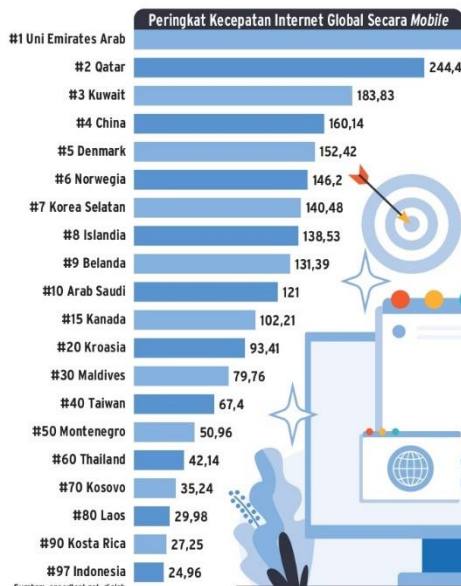
Dengan teknologi gen AI, dia memprediksi pekerjaan kreatif bisa terbantu dengan AI.

Sigit mengatakan bahwa adopsi AI di Indonesia akan lebih banyak manfaatnya, jika diperbanyak ketersediaan talenta AI dari dalam negeri.

Di samping itu, pemerintah juga perlu mulai mengantisipasi kebutuhan kebijakan dan regulasi. "Mungkin bisa dimulai dengan pendekatan *sandbox*, sambil melakukan *benchmark* dengan *best-practice* internasional," tuturnya.

Selain peluang yang sangat besar, Sigit menuturkan bahwa AI juga memiliki ancaman tersendiri, terutama untuk pekerjaan yang sederhana dan rutin misalnya administrasi dan analisis.

Jadi, gen Z di Indonesia perlu mulai meningkatkan keahliannya dalam satu pekerjaan sebelum tergantikan oleh AI. ■



Perkembangan kecerdasan buatan atau AI tidak bisa dibantah telah memudahkan beragam pekerjaan. Pada saat yang sama, AI juga menggilas pekerjaan lama yang bergantung kepada otomatisasi & robotika.

Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia


Urutan	Populasi	Pengguna internet	Penetrasi
2017	262	143,2	54,6%
2018	264,1	171,1	64,8%
2019	266,9	196,7	73,7%
2020	272	202,6	73,7%
2021-2022	272,6	210	77,02%
2022-2023	275	215,6	78,1%

SISNIS/KEVIN CHRISTIAN Sumber: APJII, diolah

Potensi Sumbangan Produksi Ekonomi dari Kecerdasan Artifisial (AI) Generatif di Indonesia

Sektor	Nilai (US\$ miliar)	Kontribusi
Manufaktur	81,9	34%
Konstruksi	39,0	16%
Perdagangan grosir & eceran	28,1	12%
Jasa transportasi	18,2	7%
Pertanian, kehutanan	13,4	6%
Lain-Lain	62,9	26%

Sumber: Laporan Access Partnership dan Etam 2023, diolah

Title	Bapanas Gencarkan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	

Hapus Kemiskinan Ekstrem

Bapanas Gencarkan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 melalui kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, dukungan ini sesuai arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan ini dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah, sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Arief dalam keterangan resmi Bapanas, Kamis (13/6/2024).

Pemberian bantuan pangan ini, lanjut Arief, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga dan mengentaskan daerah rentan pangan, serta menguatkan daerah tahan pangan.

Upaya pengentasan kemiskinan juga diyakini akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

Penyaluran bantuan pangan, lanjut Arief, sejalan dengan amanat yang diemban Bapanas berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021.

Pada Perpres tersebut, salah satu tugasnya adalah menye-

lenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan.


Saat ini juga sedang berlangsung penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta bantuan pangan daging ayam dan telur ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dikoordinir Bapanas melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Arief mengatakan, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas juga mulai melaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan.

Untuk tahun ini, intervensi tersebut menyasar 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi sebagai lokus intervensi. Bantuan pangan juga akan diberikan kepada 45.000 Kepala Keluarga (KK) pada 233 desa yang teridentifikasi berdasarkan *by name by address*.

Sumber datanya dari Penasasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pihaknya berharap *piloting* ini menjadi pemantik Pemerintah Daerah. Dalam hal ini 20 kabupaten dan 8 provinsi lokus melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat. ■ NOV

Title	Jangan Buka Lapak Di Trotoar Ya	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	11	
Author	DRS	

Jualan Hewan Kurban

Jangan Buka Lapak Di Trotoar Ya

BANYAK penjual hewan kurban menjajakan dagangannya di pinggir jalan di Jakarta. Menyulap lahan kosong menjadi tempat jualan sapi, kambing dan domba. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta memaklumi hal tersebut karena bersifat momentum saja, bukan permanen. Tapi, mereka mewanti-wanti agar tidak menggunakan trotoar untuk jualan.

Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta pedagang hewan kurban tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pada Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan.

"Kita semua harus bersama-sama mematuhi peraturan demi ketertiban dan kenyamanan bersama," kata August, Senin (10/6/2024).

Jika ada yang melanggar ketentuan tersebut, sesuai Pasal 61

ayat 1 akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.

Untuk itu, Anggota Komisi B ini mengimbau Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan pengawasan.

"Saya mengimbau untuk lebih proaktif dalam memonitor dan melakukan pengawasan serta penertiban pedagang hewan kurban yang menggunakan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum)," ujarnya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan tempat khusus yang lebih layak dan strategis bagi para pedagang hewan kurban, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

"Dengan adanya tempat khusus, diharapkan dapat menjadi solusi yang *win-win* bagi semua pihak, baik pedagang, pembeli, maupun masyarakat umum," kata August.

Dia juga meminta, para ped-



“
Kita semua harus bersama-sama mematuhi peraturan demi ketertiban dan kenyamanan bersama.

AUGUST HAMONANGAN
Anggota DPRD DKI Jakarta

gang memastikan area tempat berjualan tetap bersih dan tidak meninggalkan sampah atau kotoran yang dapat mengganggu warga sekitar.

"Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama dan sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan semua orang," tandasnya.

Layak Konsumsi

Sejak 1 Mei-10 Juni 2024, Dinas KPKP DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan sek-

itar 39 ribu hewan kurban dari 534 tempat penampungan yang tersebar di lima wilayah kota.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharni Eliawati mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang berada di ratusan tempat penampungan.

"Kami memastikan data ini terus bertambah mengingat selama lima tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta membutuhkan sekitar 61 ribu ekor hewan kurban yang terdiri dari sapi, kerbau,

kambing dan domba," kata Eli, sapaan Suharni Eliawati, Selasa (11/6/2024).

Diungkap Eli, sebagian besar hewan kurban yang masuk ke Jakarta berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.


"*Alhamdulillah*, Penyakit Mulut Kuku (PMK) sudah selesai. Kami mewajibkan hewan kurban yang masuk ke Jakarta memiliki surat keterangan kesehatan dari daerah asal dan kami melakukan double cek," ucapnya.

Eli bilang, pihaknya bersinergi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan komunitas serta sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Airlangga yang mengerahkan personel untuk melaksanakan penjangkauan saat berlangsung pemotongan hewan kurban di lima wilayah kota pada Hari Raya Idul Adha hingga hari ketiga.

"Kami juga mengimbau warga Jakarta agar membeli hewan kurban di tempat penampungan yang sudah memiliki stiker dari Dinas KPKP DKI Jakarta," pungkasnya. ■ DRS

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Kendalikan Harga Bahan Pokok	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	Budi Rahman Hakim, Ph.D	

CATATAN

Budi Rahman Hakim, Ph.D.

Kendalikan Harga Bahan Pokok

HARGA pangan kita memiliki siklus kenaikan yang begitu kukuh, sehingga seperti tidak bisa dikendalikan. Setiap menjelang perayaan-perayaan besar, seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan.

Siklus itu juga berlaku pada tiap musim. Saat terjadi kemarau panjang atau musim penghujan, harga pangan merangkak.


Fenomena siklus ini bukan hanya baru. Sejak era reformasi, mungkin sejak Orde Baru, sudah ada. Sayangnya, sampai sekarang, belum ada obat mujarab atau jurus ampuh dari Pemerintah untuk mengatasi siklus ini. Setiap tahun selalu terjadi. Ujung-ujungnya rakyat kecil yang menjadi korban, karena harus menanggung kenaikan harga tersebut dengan isi kantong mereka yang pas-pasan.

Menjelang Idul Adha ini, siklus tersebut kembali terasa. Harga bahan pokok merangkak naik. Untuk beras, kondisinya stabil mahal. Hampir setahun terakhir, harga beras tak kunjung turun.

Awalnya, kenaikan ini dianggap sebagai dampak El Nino yang membuat produksi dalam negeri turun. Pemerintah pun melakukan impor, namun tak kunjung juga menurunkan harga besar. Saat beberapa daerah sudah mulai panen raya, harga beras tetap anteng mahal.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Kendalikan Harga Bahan Pokok	
Date	14 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 2	
Author	Budi Rahman Hakim, Ph.D	

Kendalikan Harga


... DARI HALAMAN 1

Dengan kondisi ini, harusnya masalah kenaikan harga pangan “dikoyok” bareng-bareng. Tidak hanya oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Tapi oleh semua. Sebab, jika cuma satu atau dua Kementerian/Lembaga yang bergerak, siklus kenaikan harga pangan itu sulit dikalahkan.

Karena itu, mulai sekarang harus segera dipetakan dan dibagi tugas dengan baik untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Pertanian harus fokus meningkatkan produksi, Kementerian

Perdagangan mengawasi distribusi, Badan Pangan Nasional menjaga stok, Bulog menyediakan pasokan, Kementerian Perhubungan membantu transportasi distribusi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan infrastruktur pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyediakan alat agar pangan kita tahan lama, Pemda menjamin pangan dapat diterima masyarakat dengan baik, dan lain-lain.

Jika semua bekerja dan bergotong royong, siklus kenaikan itu tentu bisa kita lawan. Dengan begitu, rakyat kecil tidak lagi menjadi korban. ■

Title	Bapanas Minta PG Beli Gula Petani Sesuai Relaksasi HPP	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	14	
Author	TI	

Bapanas Minta PG Beli Gula Petani Sesuai Relaksasi HPP

JAKARTA, ID—Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) meminta pabrik gula (PG) menyerap gula petani sesuai ketentuan relaksasi harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen (harga pembelian pemerintah/HPP) Rp 14.500 per kilogram (kg). Hal itu agar petani tetap semangat menanam tebu.

Demikian disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat meninjau langsung progres giling tebu yang sedang digiatkan di PG Jatitujuh milik ID Food di Majalengka, Jawa Barat, pada 11 Juni 2024. Kunjungan itu juga untuk memastikan penyerapan gula di tingkat produsen sesuai kebijakan relaksasi. Arief yang didampingi Direktur Utama PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko sempat mengelilingi fasilitas pabrik. Bapanas melalui surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas No 346/TS.02.02/B/5/2024 tertanggal 3 Mei 2024 telah menerapkan kebijakan relaksasi HAP gula konsumsi di tingkat produsen menjadi Rp 14.500 per kg pada 3 Mei-31 Oktober 2024. Untuk harga gula konsumsi di konsumen juga telah diimplementasikan relaksasi menjadi Rp 17.500 per kg, khusus wilayah Papua dan 3TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan) diperlonggar menjadi Rp 18.500 per kg.

Menurut Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2024 yang disusun Bapanas, gula konsumsi masih ada gap minus sekitar 549 ribu ton karena perkiraan produksi dalam negeri 2,38 juta ton dan kebutuhan tahunan 2,93 juta ton. Secara historis, produksi gula biasanya hanya dalam kurun waktu lima bulan. Karenanya, perlu ada pengadaan dari luar negeri guna mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Untuk itu, pemerintah tengah mendorong program cetak lahan, termasuk tebu, salah satunya yang sedang dikembangkan di Merauke, Papua Selatan. "Ini sudah mulai musim giling, kurang lebih tiga minggu lalu dan serentak di Jawa Barat. Harapannya, rendemen bisa lebih dari 7%, kalau kurang dari itu, bisa rugi. Pesan saya ke PG Jatitujuh agar membeli tebu dari petani minimal Rp 14.500 per kg. Ini supaya petani makin semangat tanam, apalagi tebu itu tanaman semusim," kata Arief dalam keterangan yang dikutip Kamis (13/06/2024).

Direktur Utama PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko menuturkan, pihaknya sudah menyerap tebu petani sekitar 100 ton. Rendemen tebu sudah di atas 7%. PT PG Rajawali II mengharapkan kebijakan relaksasi HAP di produsen tetap ada untuk menjaga harga di tingkat petani. ID Food telah menetapkan target tingkat produktivitas gula 70,1 ton per hektare (ha) dengan target rendemen 7,57%. Di Jawa Barat, ID Food melalui PT PG Rajawali II yang mengelola PG Tersana Baru, PG Sindanglaut, dan PG Jatitujuh menargetkan produksi gula 84.800 ton atau naik 48% dari tahun sebelumnya 57.200 ton. "Minggu ketiga ini, ID Food bakal kirim gula ke konsumen, tidak hanya di Jawa Barat saja," ujar dia. (tl)

Title	Bulog Harus Intensif Jemput Gabah di Petani
Date	14 Juni 2024
Media	Investor Daily
Page	14
Author	Tri Listiyarini



Kementerian Pertanian

BERAS LOKAL DI CBP CUMA 30%

Bulog Harus Intensif Jemput Gabah di Petani

JAKARTA, ID—Sekitar 70% stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berasal dari pengadaan luar negeri (impor), sedangkan penyerapan domestik hanya menyumbang 30%. Untuk meningkatkan porsi serapan beras lokal pada stok CBP tersebut, Bulog harus memasifkan pembelian dari petani dengan mengintensifkan Program Jemput Gabah/Beras di daerah-daerah yang saat ini masih panen.

Oleh Tri Listiyarini

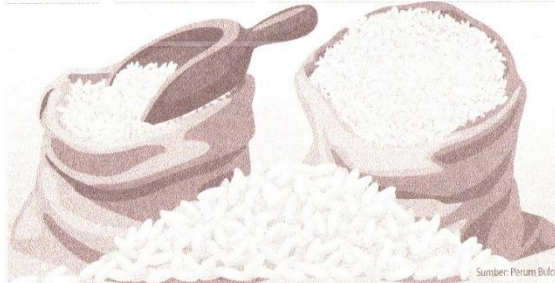
Menurut peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian, selama ini, ada kecenderungan para petani padi malas menjual hasil gabahnya ke gudang Bulog karena mereka harus mengeluarkan biaya transportasi sendiri. Karena itu, untuk mengoptimalkan serapan domestik, Bulog semestinya melakukan jemput bola dengan terjun langsung ke lapangan guna membeli gabah petani. "Petani itu malas untuk mengirim barangnya ke gudang Bulog karena mereka harus mengeluarkan biaya transportasi lagi. Jadi, sudah seharusnya Bulog berperan sama seperti bandar-bandar yang menjemput langsung (gabah) ke lahan petani, gabah oleh bandar langsung dibawa dan diangkut. Ini kalau mau stok CBP mayoritas dari lokal," ungkap Eliza saat dihubungi *Investor Daily* dari Jakarta, baru-baru ini.

Eliza mengatakan, salah satu solusi dari situasi itu adalah memberikan subsidi transportasi bagi para petani. Selain bisa dilakukan Bulog, subsidi juga bisa diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. "Bulog atau pemda bisa memberikan subsidi transportasi agar petani bisa mengirimkan gabahnya ke Bulog. Bagaimanapun daerah bertanggung jawab dalam menjaga inflasi, karenanya dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di sinilah harusnya daerah ikut berperan menjaga inflasi dengan memberi subsidi itu," papar Eliza. Dengan memiliki stok CBP melimpah, apalagi mayoritas dari dalam negeri, Bulog akan sangat leluasa dalam melakukan operasi pasar (stabilisasi pasokan dan harga pangan/SPHP) saat harga beras melambung. "Kalau beras mahal, orang kaya tidak masalah, yang paling terdampak kaum menengah ke bawah. Ini bisa diselesaikan dengan memperbesar distribusi beras SPHP," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi

Pengadaan Beras Domestik Perum Bulog

Periode	Semester I	Semester II	Total
2019	748.365	452.899	1.201.264
2020	696.297	560.210	1.256.507
2021	739.133	477.178	1.216.311
2022	550.809	443.842	994.651
2023	692.571	375.206	1.067.777



Sumber: Perum Bulog

mengatakan, dari stok CBP yang dimiliki Bulog saat ini sebesar 1,8 juta ton, sekitar 30% berasal dari dalam negeri. Hal ini tentu merupakan suatu pencapaian tersendiri, mengingat masa pengadaan dalam negeri yang singkat akibat waktu panen padi yang pendek sekitar 2-3 bulan. Untuk bisa menyerap gabah dalam negeri secara maksimal, pengadaan Bulog memiliki beberapa mekanisme. Pertama, membeli gabah dengan menunggu di gudang. Hal ini hanya bisa dilakukan di 10 Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang dimiliki Bulog, BUMN itu bisa menyerap gabah dalam jumlah cukup banyak. "Pilihan kedua adalah membeli gabah dengan cara menjemput ke petani. Mekanisme ketiga adalah membeli beras asalan dari penggilingan-penggilingan padi kecil yang kita beli dan olah sehingga menghasilkan beras sesuai kemauan pasar," jelas Bayu.

Masalahnya, meski penyerapan gabah dalam negeri sudah dilakukan dengan begitu optimal, saat ini terdapat persoalan serius pada proses produksi gabah/beras di Tanah Air. Menurut data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik

(KSA BPS), produksi padi pada periode Januari-April 2024 saja sudah turun 17,54% dibandingkan periode sama 2023 yang mencapai 22,55 juta ton. "Bulog hanya bisa menyerap gabah, bila produksinya ada. Kami berkomitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan gabah dalam negeri. Saat ini, kami telah menyerap kurang lebih 700 ribu ton, lebih dari target yang telah ditugaskan pemerintah sebesar 600 ribu ton. Kami optimistis bisa menyerap lebih dari 900 ribu ton setara beras tahun ini. Impor hanya dilakukan bila perlu, melihat neraca beras yang ada," ujar Bayu. Bulog mendapat penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor 3,6 juta ton tahun ini dan telah direalisasikan 2 juta ton.


Pangan Iduladha

Pada bagian lain, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) memastikan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2024 aman. Harga pangan juga diproyeksikan stabil, salah satunya akibat penurunan permintaan pasar yang bertepatan dengan tahun ajaran

baru anak sekolah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, usai memimpin Rakor HBKN Iduladha 2024 pada 11 Juni 2024, mengatakan, sebagaimana laporan dari para mitra pelaku usaha pangan, kondisi ketersediaan pangan pokok strategis jelang Iduladha bisa dipastikan aman dan harga relatif stabil. "Tapi, kita tetap minta agar semua pemangku kepentingan bersama-sama terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," tegas Ketut.

Bapanas terus mengupayakan berbagai aksi intervensi, seperti SPHP, fasilitasi distribusi pangan (FDP), kerja sama antardaerah (KAD), dan gerakan pangan murah (GPM), untuk menjaga disparitas harga di masyarakat demi mempertahankan laju inflasi nasional. Cadangan pangan pemerintah (CPP) di Bulog dan ID Food akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah minim ketersediaan produksi dan tergantung pasokan luar, seperti Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua. "Semua pihak harus lapor bila ada kekurangan stok bahan pangan, sehingga bisa segera dipasok oleh BUMN," papar Ketut. Dari hasil rakor, ketersediaan hewan kurban cukup, baik sapi, kerbau, atau kambing, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, harga relatif stabil seperti 2023. Kecenderungan pembelian hewan kurban masyarakat ada di bobot atau harga rendah karena ada kebutuhan lain seperti tahun ajaran baru anak sekolah.

Sedangkan untuk pangan lain, seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng, dipastikan stoknya cukup dan harganya stabil. Dalam keterangan yang dikutip Kamis (13/06/2024), harga pangan di produsen dan pedagang relatif seimbang sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga wajar. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga harga wajar di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen dengan menyesuaikan harga di hulu-hilir.

Title	Harga Pangan makin Mencekik	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	11	
Author	Kristiadi	

Harga Pangan makin Mencekik

Lonjakan harga yang terjadi sekarang lebih dipicu oleh tingginya nilai jual dari para pemasok atau pengepul.

KRISTIADI
kristiadi@mediaindonesia.com

HARGA pangan terus melonjak seiring kian dekatnya Hari Raya Idul Adha. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, harga bawang merah, cabai, telur ayam, dan sayuran merangkak naik.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikurubuk, Deri Herlisana, mengakui nilai jual sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Itu terjadi karena tingginya permintaan masyarakat menjelang hari raya, sedangkan di sisi hulu, produksi tidak bertambah.

"Ini memang biasa terjadi. Harga kebutuhan bahan pokok jelang Idul Adha di sejumlah daerah, terutama di Pasar Tradisional Pancasila dan Ciku-

rubuk, mengalami lonjakan," ujar Deri di Tasikmalaya, kemarin.

Ia menyebut harga cabai melambung dari Rp30 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp68 ribu/kg. Kemudian, beras medium dijual Rp14 ribu/kg dari semula Rp12.500/kg.

Lonjakan harga tersebut tentu membuat masyarakat resah. Widaningsih, salah satu warga Tawang, menyalahkan sikap pemerintah yang tidak mampu mengantisipasi tingginya permintaan jelang Idul Adha. Padahal, persoalan itu sudah terus berulang setiap tahun.

"Naiknya harga-harga kebutuhan pokok sangat terasa bagi masyarakat. Semua naik, termasuk bumbu dapur. Pemerintah daerah masih belum punya upaya menstabilkan

harga untuk rakyatnya sendiri," ucap Widaningsih.

Di Cianjur, tim pengendali inflasi daerah (TPID) setempat mulai turun ke lapangan lantaran masalah serupa. Ketua TPID Kabupaten Cianjur Budi Rahayu Thoyib mengatakan, saat ini harga telur ayam menyentuh Rp30 ribu/kg dari semula Rp25 ribu/kg.

"Naiknya harga beberapa komoditas ini sebetulnya lebih dipicu peningkatan permintaan, seperti telur ayam, daging ayam, dan beberapa komoditas lain. Kalau stok dan pasokan, normal seperti biasa," tutur Budi saat meninjau Pasar Rakyat Ciranjang.

Sudah tinggi dari pemasok

Namun, pernyataan tersebut dibantah Ira, pedagang telur ayam di Pasar Ciranjang. Ia mengatakan lonjakan harga yang terjadi sekarang lebih dipicu oleh tingginya nilai jual dari para pemasok atau pengepul.

"Permintaan sebetulnya ti-

dak terlalu meningkat. Justru naiknya permintaan itu biasanya setelah hari raya. Jadi sekarang kenapa bisa naik, saya kurang tahu pasti," kata Ira.

Tidak hanya di Jawa, peningkatan harga pangan juga terjadi di Sulawesi. Harga tomat sudah melambung dalam sepekan terakhir. Pada pekan lalu 1 kg tomat hanya dihargai Rp5.000, tapi sekarang sudah menyentuh Rp13 ribu.

Candra Anwar, salah satu pedagang di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Sulawesi Tengah, menyebut stok dari pedagang besar terus berkurang, sedangkan permintaan masyarakat makin tinggi. "Rata-rata tomat ini pasokan tiga hari lalu. Biasanya setiap hari ada pasokan, tapi ini tidak. Ada info ternyata petani belum panen raya, makanya pasokan berkurang," terang Candra.

Meski mahal, tomat masih diburu masyarakat sebagai

bagian dari bahan pembuatan bumbu atau makanan yang biasa disajikan pada masa Idul Adha. "Pembelian lumayan tinggi, apalagi menjelang Lebaran Haji," tandasnya.

Di Jawa Timur, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, dari semua bahan pangan, bawang merah adalah yang paling diwaspadai lonjakan harganya. Pasalnya, komoditas tersebut kerap berkontribusi besar dalam memicu inflasi. "Harga bawang merah ini diprediksi akan melambung tinggi," papar Wahyu.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya bersama TPID telah berupaya mengamankan stok yang ada dari para petani. Pasokan tidak hanya didatangkan dari wilayah sendiri, tetapi juga lintas daerah seperti Probolinggo. "Saat lonjakan harga tidak terbendung, kita punya stok untuk digelontorkan ke pasar," tukasnya. (BB/TB/RR/HS/BN/AN/Z-11)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN**

Title	Paten Produk Hilir Kelapa Sawit
Date	14 Juni 2024
Media	Koran Kontan
Page	15
Author	Prima Gandhi



Paten Produk Hilir Kelapa Sawit

Sembilan tahun lalu, tepatnya 10 Juni, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembentukan BPDPKS merupakan pelaksanaan amanat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. BPDPKS dibentuk sebagai pengelola dana pengembangan dan cadangan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dana yang dikelola BPDPKS dihimpun dari pelaku usaha hulu-hilir kelapa sawit dan dikenal dengan Crude Palm Oil Supporting Fund (CSF). CSF digunakan sebagai modal program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Secara kelembagaan BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BPDPKS memiliki visi menjadi pengelola dana yang berperan bagi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis Indonesia.

Berdasar visi misi BPDPKS, porsi anggaran operasional kelembagaan BPDPKS tidak boleh lebih besar dari program yang dibuatnya. BPDPKS dibutuhkan terutama sebagai katalis pengoptimalisasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Indonesia dibanding negara lain yaitu membudidayakan kelapa sawit. Keunggulan komparatif Indonesia ini bersifat *given* karena dipengaruhi letak astronomis dan geologis.

Letak astronomis merupakan posisi suatu wilayah berdasar koordinat garis lintang dan bujur. Letak astronomis memengaruhi iklim. Iklim tropis yang lembab di Indonesia menjadi salah satu syarat tumbuh ideal tanaman kelapa sawit. Syarat tumbuh pendukung optimalisasi budi daya kelapa sawit lain yang Indonesia miliki adalah suhu 24-28 °C, ketinggian 1-500 mdp1, curah hujan 1250-2500 mm per tahun, kecepatan angin 5-6 km per jam, tingkat kelembaban 80%-90% dan paparan sinar matahari selama 5-7 jam per hari.

Jika letak astronomis memengaruhi iklim, letak geologis memengaruhi jenis tanah. Tipologi tanah Indonesia berjenis podzolik memenuhi syarat sebagai tanah yang baik membudidayakan kelapa sawit. Selain berjenis podzolik, tanah di wilayah Indonesia gembur, kaya akan humus, memiliki pH 5,5-7,0, memiliki kemiringan lereng 0%-3%, dan tidak memiliki lapisan padas.

Keunggulan komparatif membuat Indonesia mampu memproduksi kelapa sawit dengan biaya lebih efisien daripada negara lain. Keung-



Prima Gandhi,
Mahasiswa Doktorat Tokyo
University of Agriculture Jepang;
Dosen Manajemen Agribisnis
Sekolah Vokasi IPB University

gulan komparatif budi daya kelapa sawit merupakan modal dasar agribisnis yang harus didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) Indonesia dari negara produsen lain.

Negara produsen kelapa sawit pesaing Indonesia adalah Malaysia. Saat ini, kualitas minyak sawit dan produk turunan kelapa sawit Malaysia lebih baik. Namun, pertumbuhan ekspor minyak sawit Malaysia diperkirakan tertahan karena keterbatasan lahan dan manusia. Akibat kekurangan 40.000 tenaga kerja, Malaysia mengalami kerugian RM 7,9 miliar atau Rp 26,7 triliun per tahun (Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, 2024).

Berbeda dengan Malaysia, agribisnis kelapa sawit Indonesia ke depan memiliki potensi berkembang karena dukungan ketersediaan lahan, sumber daya manusia (SDM) dan peluang meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi budi daya kelapa sawit serta hilirisasi industri produk kelapa sawit.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan kompetitif memproduksi sawit dan produk turunannya, Indonesia harus memiliki strategi keberlanjutan yang mumpuni. Ada berbagai strategi pemerintah melalui BPDPKS, mulai dari peningkatan kapasitas serta kinerja SDM, pengelolaan produksi kelapa sawit hingga riset sektor hulu-hilir kelapa sawit.

Strategi berkelanjutan

Program peningkatan kapasitas SDM yang terlibat pada rantai tata niaga kelapa sawit menjadi kunci keunggulan kompetitif Indonesia ke depan. Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti penyuluhan, pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan BPDPKS kepada *stakeholders* perkelapasawitan Indonesia tak boleh berhenti walau rezim pemerintahan berganti. Terkait aktivitas pendidikan, BPDPKS rutin memberikan beasiswa bagi masyarakat dari komunitas perkebunan kelapa sawit.

Tiga harapan penulis dari aktivitas pendidikan dan pemberian beasiswa BPDPKS ialah pertama, lahir tenaga kerja muda profesional dari perguruan tinggi vokasional yang siap berkarir di sektor hulu-hilir kelapa sawit Indonesia. Kedua, periset Indonesia dapat melakukan penelitian berkesinambungan untuk menghasilkan praktik budi daya kelapa sawit yang efisien dan efektif. Ketiga, para pekebun dan pengelola perkebunan dengan bekal ilmu serta pengalaman dari program pelatihan inisiasi BPDPKS mampu memelihara pohon kelapa sawit dengan baik sehingga menghasilkan panen optimal.

Program peningkatan kapasitas SDM yang terlibat pada rantai tata niaga kelapa sawit menjadi kunci keunggulan kompetitif Indonesia ke depan. Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas SDM seperti penyuluhan, pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan BPDPKS kepada *stakeholders* perkelapasawitan Indonesia tak boleh berhenti walau rezim pemerintahan berganti. Terkait aktivitas pendidikan, BPDPKS rutin memberikan beasiswa bagi masyarakat dari komunitas perkebunan kelapa sawit.

Tiga harapan penulis dari aktivitas pendidikan dan pemberian beasiswa BPDPKS ialah pertama, lahir tenaga kerja muda profesional dari perguruan tinggi vokasional yang siap berkarir di sektor hulu-hilir kelapa sawit Indonesia. Kedua, periset Indonesia dapat melakukan penelitian berkesinambungan untuk menghasilkan praktik budi daya kelapa sawit yang efisien dan efektif. Ketiga, para pekebun dan pengelola perkebunan dengan bekal ilmu serta pengalaman dari program pelatihan inisiasi BPDPKS mampu memelihara pohon kelapa sawit dengan baik sehingga menghasilkan panen optimal.

taan inovasi dan paten produk hilirisasi kelapa sawit. Sebab berdasarkan teori *smile curve* (kurva tersenyum) yang dikemukakan Shi Zhenrong (CEO Acer), paten, inovasi teknologi, merek dan jasa punajual produk memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada pabrikasi sebuah produk. Kurva tersenyum merupakan sebuah *framework* untuk menganalisis tingkat nilai tambah dan *industry chain* sebuah produk. Kurva ini dapat menjelaskan proses produksi, distribusi hingga pasca produksi sebuah produk hingga peranan yang baiknya diambil oleh negara pada proses bisnis produk tersebut.

Berkaca dari teori *smile curve*, saat ini Indonesia masih sedikit memiliki paten dan inovasi teknologi untuk komoditas hilir kelapa sawit. Merujuk data Patent Scope Intellectual Property Rights Organization, terdapat 7.459 paten produk hilir kelapa sawit. Mayoritas paten dimiliki negara non produsen kelapa sawit. Amerika serikat memiliki 4.101 paten sedangkan Indonesia hanya memiliki 3 inovasi paten.

Di Asia, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang memiliki 79 inovasi paten, Singapura memiliki 34 inovasi paten dan Thailand dengan 4 inovasi paten. Terkait produk turunan *crude palm oil* (CPO), Indonesia hanya memiliki 47 produk sedang Malaysia memiliki lebih dari 100 produk turunan CPO.

Berdasarkan teori dan fakta ini, BPDPKS harus fokus menambah porsi pendanaan program riset penghasil paten. Penulis menyarankan BPDPKS membuat skema pendanaan riset terapan selain program *grant* riset sawit dan lomba riset sawit tingkat mahasiswa. Tujuannya agar jumlah paten produk hilirisasi sawit meningkat signifikan. Karena sejak 2015 sampai Juni 2020 program riset BPDPKS hanya menghasilkan 40 paten yang mayoritas tidak terkait produk turunan CPO.

Sasaran riset terapan adalah civitas akademik pendidikan tinggi vokasional yang terbiasa menghasilkan paten dari riset terapan. Dengan peningkatan jumlah inovasi beserta paten produk hilir kelapa sawit yang dimiliki Indonesia maka kontribusi ekonomi kelapa sawit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan makin besar. ■




Setelah meningkatkan kapasitas SDM, strategi yang mesti diakselerasi ialah menciptakan paten produk hilirisasi kelapa sawit. Paten produk hilirisasi kelapa sawit diperlukan sebagai penghela devisa negara dari sisi ekspor. Dibutuhkan ketekunan peneliti melakukan riset serta dukungan anggaran yang tidak sedikit untuk menciptakan inovasi serta mematenkannya.

Negara wajib hadir dalam pencip-

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Program Makan Siang Gratis dan Kemiskinan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	6	
Author	Hardius Usman	

Program Makan Siang Gratis dan Kemiskinan

Hardius Usman

Guru Besar Politeknik Statistika STIS

Dalam Pemilu 2024, "bagi-bagi uang" yang dipraktikkan para calon pemimpin tak begitu ramai lagi dibicarakan. Mungkin tertutupi oleh isu yang lebih besar, yaitu pemberian bantuan sosial oleh Presiden. Atau, "bagi-bagi uang" sudah jadi perilaku lumrah dan dapat diterima masyarakat.

Tak heran, banyak kontestan pemilu terang-terangan melakukan hal itu, padahal jelas melanggar Pasal 523 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dari perspektif ekonomi, bertemunya *supply* dan *demand* sudah jadi perilaku lumrah dan kemudian terjadilah transaksi. Salah satu penentu terjadinya transaksi adalah harga. Oleh karena itu, besarnya "harga" suara dapat dijadikan barometer kehidupan masyarakat "kelas bawah" di negeri ini.

Semakin sulit kehidupan mereka, semakin murah harga "suara" di pasar. Jadi, hipotesis bahwa para pemimpin Indonesia membutuhkan kemiskinan agar biaya untuk mendapatkan suara rendah, tak salah. Apa ini penyebab kemiskinan di Indonesia hanya turun sekitar 2 persen dalam 10 tahun terakhir?

Masyarakat berkekurangan

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu keniscayaan, baik di negara sosialis atau komunis sekalipun. Sebab, tiap-tiap individu menguasai sumber daya yang berbeda.

Merujuk pada statistik, ketimpangan pendapatan di Indonesia "baik-baik" saja. Dari hitungan BPS, rasio gini Indonesia hanya 0,388 pada Maret 2023. Sementara, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, ketimpangan kita tergolong rendah, tecermin dari distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah, yakni 18,04 persen.

Statistik ketimpangan pen-

dapatan yang "baik-baik" saja ini bukan berarti penduduk yang di piramida terbawah juga baik-baik saja. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah paling mendasar: ketersediaan dan akses pangan.

Menurut Global Food Security Index, pada 2022, dari total 113 negara, Indonesia di urutan ke-84 untuk ketersediaan pangan dan ke-44 untuk keterjangkauan pangan. Capaian ini lebih rendah dari negara tetangga, seperti Thailand (urutan 77 dan 39), Vietnam (49 dan 38), dan Malaysia (56 dan 30).

Dampak kondisi itu juga terlihat di statistik. Merujuk Center for Indonesian Policy Studies, di Indonesia terdapat 21 juta jiwa atau 7 persen dari populasi yang kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kemenkes, 2.100 kilo kalori (kkal).

Tercatat pula, 21,6 persen anak berusia di bawah lima tahun mengalami tengkes di 2023. Sementara 7,7 persen lainnya menderita *wasting* alias rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

Yang lebih parah tentu statistik yang dikeluarkan World Population Review. Rata-rata IQ orang Indonesia 78,49. Jika sebaran IQ mengikuti distribusi normal, dapat dinyatakan lebih dari 50 persen rakyat Indonesia tergolong "bodoh".

Pada Maret 2023, menurut catatan BPDS, tingkat kemiskinan di Indonesia "cukup rendah", yaitu "hanya" 9,36 persen. Namun, mereka yang hidup di atas garis kemiskinan, menurut BPS, tak bisa digolongkan sejahtera. Tak sedikit penduduk Indonesia yang tak miskin, masih hidup dalam kekurangan.

Mungkin, inilah yang menyebabkan angka tengkes atau IQ rendah jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ketersediaan dan akses pangan

bukan hanya permasalahan bagi kelompok miskin, melainkan juga mereka yang hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih sangat berkekurangan.

Jadi, tak heran bila kontestan pemilu meyakini, "serangan fajar" bisa mendongkrak suara mereka dengan biaya yang tak terlalu mahal. Sebab, "pasar" masih terbuca luas.

Makan siang gratis

Dunia telah mengakui berbagai kemajuan pembangunan di Indonesia, seperti infrastruktur, teknologi, dan sebagainya. Indonesia kini anggota G20, dan diharapkan sebentar lagi akan menjadi negara maju.

Namun, kita tak boleh lupa di balik kegemerlapan hasil pembangunan, sangat banyak rakyat yang masih memikirkan "urusan perut". Unggulnya program makan siang gratis dibanding program pendidikan gratis dan internet gratis dapat dijadikan indikator kondisi tersebut.

Program calon presiden merupakan "perjanjian" dengan rakyat. Walau setelah terpilih tak ada sanksi hukum bagi presiden jika mengingkari janjinya, mungkin bisa mendapatkan sanksi sosial atau politik, atau lainnya. Namun, semua bisa diselesaikan karena saat berkuasa semua bisa direkayasa.

Sekalipun demikian, alangkah eloknya jika presiden terpilih di Pemilu 2024 memenuhi janjinya untuk melaksanakan program makan siang gratis.

Sangat beralasan jika berbagai pihak mencemaskan anggaran program ini yang mencapai Rp 450 triliun per tahun. Menyediakan anggaran sebesar itu sesungguhnya bukan masalah bagi Indonesia.

Meningkatkan pendapatan sebesar itu dalam waktu singkat mungkin sulit. Entah kalau korupsi dapat dihabisi dengan cepat. Jika tidak dapat meningkatkan anggaran dengan cepat,

tentunya harus dilakukan realokasi anggaran. Artinya, akan ada proyek atau kegiatan pemerintah yang tidak dilaksanakan, diperkecil skalanya, atau ditunda pelaksanaannya.

Di samping itu, efisiensi anggaran merupakan langkah yang dapat pula dilakukan pemerintah. Maukah kita berkorban untuk orang-orang miskin?

Dalam perspektif penghapusan kemiskinan, tentu program makan siang gratis tidak boleh menyubstitusi anggaran perlindungan sosial.

Dengan anggaran Rp 450 triliun per tahun ditambah anggaran perlindungan sosial yang besarnya sekitar itu juga, dapat diyakini orang miskin atau orang yang hidup berkesusahan akan turun dengan cepat.

Dengan anak-anak miskin mendapat manfaat dari program makan siang gratis dan rumah tangga miskin mendapat bansos, kalori yang dikonsumsi rumah tangga juga meningkat sehingga mereka tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun belum tentu sejahtera, setidaknya kebutuhan manusia yang paling dasar telah tercukupi.

Jadi, pelaksanaan program makan siang gratis bukan masalah mampu atau tidak mampu, melainkan mau atau tidak mau. Idealnya memang pemerintah tidak "menyuapi" rakyatnya dengan makanan atau berbagai bantuan, melainkan menyediakan lapangan pekerjaan agar semua rakyat dapat mencari makan sendiri.

Namun, sebagaimana di berbagai negara di dunia ini, kondisi ideal itu masih harus diperjuangkan. Padahal, bagi rakyat lapisan bawah, tidak mungkin urusan perut ditunda-tunda.

Negara wajib memelihara orang miskin, bukan kemiskinan itu sendiri. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak. Sudah dapat dipastikan

bagi-bagi uang dan serangan fajar akan kembali terjadi kecuali jika penyelenggara pemilu berani menegakkan hukum sebagaimana diamanahkan kepadanya. Politik uang memberi manfaat sesaat bagi orang-orang yang berkekurangan. Namun, akan menyengsarakan mereka dalam jangka panjang.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Kalah bersaing, ribuan penggilingan padi tumbang.

Bagaimana ribuan orang yang bergantung hidup darinya?

Taksi terbang Intercrus Sola bakal mengudara di Ibu Kota Nusantara. Asyik, naik taksi terbang.

Menyulap sampah botol plastik menjadi perahu. Kreativitas gak ada matinya.

Mang Usil

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Turun 5 Juta Ton, Impor Bisa Bengkok
Date	14 Juni 2024
Media	Koran Kontan
Page	14
Author	Lailatul Anisah



Kementerian Pertanian

■ IMPOR BERAS

Turun 5 Juta Ton, Impor Bisa Bengkok

JAKARTA. Pemerintah bersiap mengerek impor beras lagi pada tahun ini. Pasalnya, kebutuhan dalam negeri terus meningkat, sementara produksi domestik justru terus menurun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi produksi beras pada tahun ini berkurang sebesar 5 juta ton. Prediksi itu seiring dengan adanya defisit produksi beras pada periode Januari-Juli 2024 yang mencapai 2,6 juta ton.

Kuota impor beras tahun ini ditetapkan sebesar 3,6 juta ton.

Sementara di semester II 2024 produksi beras juga diprediksi terus tergerus. "Kalau diskusi saya dengan Menteri Pertanian memproyeksikan sekitar 5 juta ton (kekurangan produksi beras). Dilihat dari grafik dan *pattern* di semester kedua memang agak berat produksinya," ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (12/5).

Hanya saja, Arief belum bisa berspekulasi ihwal penambahan impor dari kuota yang telah ditetapkan yaitu

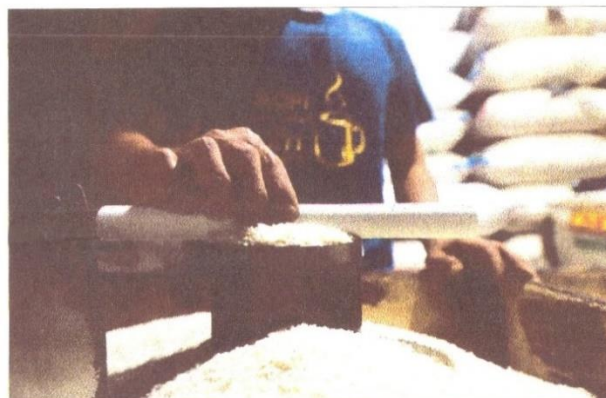
3,6 juta ton pada tahun ini. Menurut dia, Bapanas bersama Kementerian Pertanian berupaya menutup kekurangan ini dengan peningkatan produksi dalam negeri.

Adapun beberapa langkah yang sudah dilakukan antara lain penambahan alokasi pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton hingga peningkatan program pompanisasi. "Sekarang saja dari 3,6 juta ton (kuota impor), kita masih pelan-pelan, baru 2 juta ton. Nanti kalau diperlukan, tapi kita usahakan (pasokan) dalam negeri. Sayangnya, 3 juta ton impor itu yang Rp 30 triliun (mengalir ke petani luar negeri)," ucap Arief.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan, realisasi impor beras hingga telah mencapai 2 juta ton dari kuota 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor tersebut didatangkan dari Vietnam, Thailand dan Pakistan. "Kami *standby* kalau butuh tinggal ambil," tutur dia.

Bayu menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penambahan kuota impor. Menurut dia, pada sidang kabinet terakhir, impor tetap di angka 3,6 juta ton sesuai dengan penugasan awal tahun lalu. "Kalau cukup pengadaan dalam negeri sisanya tidak impor," jelas Bayu.

Lailatul Anisah



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

BIRO

Prediksi itu seiring dengan adanya defisit produksi beras pada periode Januari-Juli 2024 yang mencapai 2,6 juta ton.

BLIK

Title	Ada Hewan Kurban Cacat Sampai Sakit di Depok
Date	14 Juni 2024
Media	Indo Pos
Page	5
Author	Aro



Kementerian Pertanian

Ada Hewan Kurban Cacat Sampai Sakit di Depok



FOTO: ANTARA/PERU LAMBUKA

Petugas memeriksa hewan kurban di Kota Depok, dahar.

INDOPOS.CO - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Jawa Barat, mengimbau kepada pedagang hewan kurban tidak menjual hewan yang tidak memenuhi unsur kesehatan.

"Saat pemeriksaan hewan kurban kami menemukan

adanya beberapa kelainan pada hewan kurban," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DKP3 Kota Depok Dede Zuraida di Depok, Kamis (13/6).

Kelainan yang ditemukan antara lain lima sapi belum cukup umur, satu sapi kurus, satu kambing cacat, dua

kambing belum cukup umur, dua kambing kena Penyakit Mulut Kuku (PMK), dua kambing sakit mata, dan satu domba ORF atau Dermatitis Pustularis Contagiosa.

"Kami langsung ambil tindakan hewan-hewan yang sakit dan diminta untuk diisolasi dari hewan yang sehat,"

jelasnya.

Untuk itu ia mengimbau konsumen untuk memilih hewan yang memenuhi syarat kesehatan yang telah ditentukan dan syarat.

Dede Zuraida mengatakan pihaknya bersama mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) - Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dokter hewan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI melakukan pemeriksaan hewan kurban.


"Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup persyaratan hewan kurban, seperti kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan pengawasan lalu lintas hewan kurban," katanya dilansir Antara.

Selain itu DKP3 Kota Depok juga memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan terkait rekomendasi dan persetujuan tempat berjualan serta tempat pemotongan hewan kurban.

"Data 7 Juni 2024 terdapat 21 lapak dengan total hewan kurban sebanyak 1.501. Dengan rincian 659 sapi, 620 kambing, dan 222 ekor domba," kata Dede. (aro)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Alsintan Dioperasikan 24 Jam Agar Petani Tetap Bertanam Padi	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Harian Bhirawa	
Page	9	
Author	Min.dre	

Alsintan Dioperasikan 24 Jam Agar Petani Tetap Bertanam Padi

Mojokerto, Bhirawa

Musim kemarau ternyata tidak menyurutkan nyali para petani di wilayah Mojokerto Raya untuk tetap menanam padi. Hal ini lantaran pompa air bantuan dari Pemerintah Pusat (Kementan RI) yang dibantu kepada para kelompok tani melalui Kodim 0815/Mojokerto, terus dioperasikan selama 24 jam.

Sehingga kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian telah tercukupi air. Salah satunya yang dilakukan Koramil 0815/03 Sooko Kabupaten Mojokerto, para Babinsanya melakukan upaya pendampingan penanaman bibit padi di wilayah binaan tepatnya lahan persawahan Desa Klintirejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Kamis (13/06/2024).


Danramil 0815/03 Sooko Kapten Inf Irsyad Hari Purnomo mengatakan, distribusi Pompa Air Brigade Alsintan yang telah diberikan kepada Poktan Suko Mulyo dan Poktan Tani Raharjo hingga saat ini telah beroperasi dengan lancar untuk mengalirkan air ke persawahan.

“Target yang diari 16 hektar dari luas lahan 25 hektar yang dikelola Poktan Suko Mulyo, dengan capaian target harian 1,5 hektar. Sementara untuk Poktan Tani Harjo dari lahan seluas 20 hektar target yang diari 10 hektar dengan capaian target harian 1,5 hektar,” terang Danramil.

Dengan adanya pompa air Brigade Alsintan dari Kementan RI telah memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Sooko.

“Babinsa kami juga di lapangan terus melakukan upaya pendampingan dengan melakukan pemantauan sejak penyiapan lahan, pengairan, penanaman dan perawatan hingga masa panen tiba”, pungkasnya.

Pantauan di lapangan, tampak Babinsa bersama anggota Poktan melakukan penyiapan bibit padi dan melakukan pembajakan sawah di lahan berbeda untuk penyiapan penanaman. **[min.dre]**

Title	Alumni UNM Siap Mengabdikan di Masyarakat	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	12	
Author	Wid/lin	



WIDYAWAN/FAJAR

CETAK LULUSAN. Penyerahan data wisudawan dari WR I UNM Prof Hasnawi Haris (kiri) kepada Rektor UNM Prof Karta Jayadi, di tengah prosesi wisuda UNM di Pelataran Gedung Phinisi UNM, Kamis, 13 Juni.

Alumni UNM Siap Mengabdikan di Masyarakat

MAKASSAR, FAJAR — Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali mengukuhkan 1.000 alumni pada wisuda yang berlangsung di pelataran Gedung Phinisi, pada Kamis, 13 Juni 2024. Sepanjang berdirinya, UNM sudah mencetak 161.972 alumni.

Wisuda kali ini juga menjadi momen penting bagi Rektor UNM Prof Karta Jayadi. Sebab ini kali pertama dia memimpin prosesi pengukuhan wisudawan pasca menang dalam Pilreklalu. Ia berharap para wisudawan agar mempersiapkan diri untuk mengabdikan di tengah masyarakat.

Sebab, kata dia, wujud dari ilmu yang selama ini dipelajari di kampus akan terlihat ketika sudah mengabdikan diri kepada masyarakat.

"Saya berharap anda

mempersiapkan diri dengan baik untuk mengabdikan kepada masyarakat. Tunjukkan jati diri sebagai ilmuwan yang profesional dalam bidang yang anda geluti. Sehingga menjadi alumni yang berkualitas dan mampu bersaing," harapnya.


Dari 1.000 wisudawan, Fakultas ekonomi kembali menjadi penyumbang wisudawan terbanyak dengan 170 orang. Jumlah ini sama dengan lulusan Program Pasca Sarjana (PPS) yang juga berjumlah 170 orang.

Kemudian, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 132 orang, Fakultas MIPA 123 Orang, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) 119 orang, juga Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) 109 orang. Selebihnya, Fakultas Teknik menyumbang 92

orang, FISH 75 orang, Fakultas Psikologi 26 orang, lalu Fakultas Seni dan Desain 17 orang.

"Jadi dari seribu wisudawan hari ini, ada 712 orang dari program kependidikan dan 288 orang program non kependidikan. Dengan tambahan seribu orang wisudawan hari ini, total lulusan UNM sudah 161.972 orang," kata dia.

Dalam wisuda kali ini, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman jugaturut hadir secara daring. Dia mengimbau kepada para wisudawan agar senantiasa memuliakan orang tua, terutama Ibu. Sebab, ibu merupakan kunci bagi setiap anak untuk bisa mencapai kesuksesan. "Restu dan doa ibu akan menjadi pembuka jalan yang baik dalam mewujudkan segala mimpi," pesannya (**wid/lin**)

Title	Bupati Dukung Program Cetak Sawah Rakyat	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Kaltim	
Page	2	
Author	Prokopim/len	



RAKOR PERTANIAN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Auditorium Gedung F Kementan RI, Jumat (7/6/2024). Rakor ini dihadiri Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh.



Bupati Dukung Program Cetak Sawah Rakyat

► Hadiri Rakor Perluasan Areal Tanam Kementerian Pertanian



Kami mengapresiasi karena program ini sangat bersinergi dengan program recovery Mahulu pascabencana banjir. Akibat bencana banjir banyak alsintan bahkan lahan pertanian terendam dan rusak

BONIFASIUS BELAWAN GEH
Bupati Mahakam Ulu

JAKARTA - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Auditorium Gedung F Kementan RI, Jumat (7/6/2024)

Rakor dibuka oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. diwakili Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan

Nasional Arief H. Prasetyo Adi, S.T., M.T. Gubernur/Bupati Wali Kota seluruh Indonesia.

Pada rakor tersebut, Bupati Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menerima Program Cetak Sawah Rakyat secara swakelola dan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang diserahkan secara simbolis oleh Mentan Andi Amran Sulaiman.

Bupati Bonifasius Belawan menyatakan komitmen penuh Pemkab Mahulu dalam mendukung implementasi program Cetak Sawah Rakyat. Program tersebut, sejalan

dengan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Mahulu yakni pembukaan lahan pertanian seluas 10 hektare di setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Mahulu.

"Program Kementan ini sangat bagus dan bersinergi dengan program ketahanan pangan pembukaan lahan 10 hektare di setiap kampung, ketahanan pangan dapat kita capai dengan perluasan lahan, meningkatkan produksi yang didukung oleh sarana dan prasarana alat-alat pertanian," kata

Bupati.

Lanjut Bupati Bonifasius, dalam rakor Menteri Pertanian mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan produksi pangan nasional khususnya beras dengan memperluas areal tanam. Program cetak sawah rakyat menjadi fokus utama meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas dari lahan sawah eksisting sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah terjadinya krisis pangan dengan memperkuat pertanian menuju swasembada pangan.

"Kementan memberikan


bantuan alsintan untuk daerah-daerah yang hadir secara langsung di rakor ini, untuk mendukung pertanian di daerah. Kami mengapresiasi karena program ini sangat bersinergi dengan program recovery Mahulu pascabencana banjir. Akibat bencana banjir banyak alsintan bahkan lahan pertanian terendam dan rusak," kata Bupati.

Di akhir penyampaian Bupati Bonifasius menuturkan, dengan adanya bantuan alsintan, diharapkan pertanian di Mahulu akan semakin modern, produktif, dan berkelanjutan, mampu menjadi lokomotif

dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, mendakikanjuti arahan Mentan RI atas bantuan alsintan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu segera mempercepat proses pengurusan agar bantuan alsintan dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh petani. "Agar bantuan-bantuan yang diberikan segera tersalurkan dan ketika sudah sampai di daerah sehingga DKPP mendata kecamatan/kampung penerima bantuan tersebut," pesan Bupati. **(prokopim/len)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Belum Ada Kasus Flu Burung pada Manusia di Indonesia	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Ata/H-2	

Belum Ada Kasus Flu Burung pada Manusia di Indonesia

KASUS flu burung tengah menjadi sorotan sesuai laporan WHO tentang kematian pertama di dunia akibat virus flu burung H5N2. Selain itu, pada 11 Juni 2024 WHO kembali memublikasikan *Disease Outbreak News* penyakit akibat virus flu burung di India, selain yang kasus flu burung H5N1 di Australia. Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa belum ada kasus flu burung pada manusia di Indonesia.

“Belum ada (kasus flu burung di Indonesia) pada manusia. Tapi kalau hewan, bisa dicek ke Kementerian Pertanian,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, Kemenkes akan selalu melakukan upaya

pengecahan meskipun virus tersebut belum menjangkit manusia. Salah satu hal yang dilakukan ialah surveilans.


“Ada surveilans *influenza-like illness* (ILI) dan *severe acute respiratory infection* (SARI) dan ada program *one health* yang melakukan koordinasi dan surveilans pada manusia, hewan ternak, dan satwa liar yang dilakukan kolaborasi antara Kemenkes, Kementan, dan KLHK,” pungkas Nadia.

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama menyatakan kasus H9N2 di India sekarang ini dideteksi dan dilaporkan oleh International Health Regulations (IHR) National Focal Point (NFP) Kementerian Kesehatan India ke WHO. Menurut aturan

internasional, kasus pada manusia yang tertular virus flu burung novel itu berpotensi menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang besar.


“Kalau nanti terjadi juga di negara-negara lain, termasuk Indonesia, negara-negara itu juga harus melaporkannya ke WHO agar ada pengendalian terkoordinasi secara internasional,” ucap dia.

Apa yang terjadi berturut-turut di India, Australia, dan Meksiko itu, tegas Tjandra, tentu perlu membuat waspada. Surveilans yang ketat perlu terus dilaksanakan. “Hanya dengan pencegahan yang baik, deteksi yang cepat, dan respons segera, flu burung akan dapat dikendalikan di dunia dan di negara kita,” pungkas dia. (Ata/H-2)

Title	Kementan Tekankan Pentingnya Pencegahan Dini Perbuatan Melawan Hukum	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	12	
Author	Media Indonesia	

Kementan Tekankan Pentingnya Pencegahan Dini Perbuatan Melawan Hukum

INSPEKTUR Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budi-yanto mengatakan pegawai di semua satuan unit kerja di Kementerian Pertanian bisa menjadi benteng terakhir untuk melakukan pencegahan tindakan melawan hukum. Soalnya, setiap unit kerja ada peraturan pencegahan untuk mengantisipasi sejak awal. (Ekonomi)

Title	Belum Ada Klaim AUTP oleh Petani KSB	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	10	
Author	Bug	

Belum Ada Klaim AUTP oleh Petani KSB



Muhammad Saleh
(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) -

Pasca Musim Tanam (MT) 1 tahun 2024 ini belum ada petani di Kabupaten Sumba Barat yang mengajukan klaim Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

"Sampai sekarang catatan kami belum ada yang mengajukan klaim asuransi," terang Kepala Dinas Pertanian KSB, Muhammad Saleh, Kamis (13/6).

Ia mengaku, sebelumnya sejumlah petani di kecamatan Brang Rea pernah melaporkan tanaman padinya teran-

cam gagal panen dan mengusulkan untuk klaim asuransi. Namun pada akhirnya, klaim tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena para petani pemilik lahan tetap melakukan pemanenan. "Memang hasilnya tidak maksimal, tapi kemudian itu tidak masuk dalam kategori yang dijamin asuransi," paparnya.

Saleh menjelaskan, sesuai aturan, perhitungan perlindungan AUTP baru dapat berlaku setelah umur tanan padi mencapai 40 hari. Jika saat itu tana-

man padi mengalami kerusakan dan berujung gagal panen, maka petani berhak mengajukan klaim. "Jadi berlakunya asuransi tidak dihitung sejak proses tanam. Tapi sejak umur 40 hari pasca tanam," urainya.


Tahun ini sendiri Pemda KSB melalui Dinas Pertanian menyiapkan program AUTP untuk 5.000 hektar area tanam padi. Saleh mengatakan, sama pada tahun-tahun sebelumnya kepesertaan petani pada asuransi tersebut diberikan subsidi premi oleh pemer-

intah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun skema pelaksanaan AUTP, preminya ditetapkan sebesar Rp180.000/hektar sekali musim tanam. Di mana sebesar 80 persen dari total premi atau senilai Rp144.000 dibayarkan dari bantuan pemerintah pusat dan premi swadaya sebesar 20 persen atau senilai Rp36.000 dibayarkan oleh petani. "Nah kalau di KSB kepesertaan petani gratis karena yang premi swadayanya disubsidi lewat APBD," tukas Saleh. **(bug)**

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Cegah Penyimpangan Satgasus Kementan Turun Awasi Persoalan Pupuk di Lobar	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	11	
Author	Her	



DISTRIBUSI - Pendistribusian pupuk di wilayah Lobar.

(Suara NTB/her)

Cegah Penyimpangan, Satgasus Kementan Turun Awasi Persoalan Pupuk di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) -

Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kementerian Pertanian (Kementan) turun mengawasi persoalan pupuk di Lombok Barat (Lobar). Satgasus bertemu dengan pihak Pemkab Lobar dan unsur terkait membahas seputaran masalah pupuk.


Kadis Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan Satgasus turun pendampingan ke Lobar beberapa pekan lalu. "Pertemuan diadakan di ruang Pak Pj Bupati," kata Damayanti, kemarin. Tim Satgasus dari Kementan tersebut, diantaranya juga ada mantan pegawai KPK yang direkrut oleh Kementan.

Pendampingan dilakukan agar Pemda tidak salah dalam tata kelola pupuk tersebut. Karena itu, Tim Satgasus tersebut memberikan sosialisasi kepada Pemkab di hadiri Pj Bupati, Kepala OPD dan para distributor pupuk. Tim ini menekankan kepada distributor pupuk agar tidak main-main dalam hal pendistribusian. Berdasarkan kuota pupuk tahun ini terjadi pe-

nambahan kuota, dari usulan urea 11 ribu ton sebelumnya diberikan 6 ribu ton, ditambah 5 ribu.

"Ya sudah ditambah kuota pupuk," kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid PSP) pada Distan Lobar, I Nyoman Sugiarta. Sebelumnya, alokasi pupuk subsidi masing-masing pupuk Urea sebanyak 5.979 ton dan NPK 3.796 ton. Kalau dilihat dari usulan mengacu RDKK, terpenuhi sekitar 53 Persen untuk urea sedangkan Pupuk NPK sekitar 29 persen dari RDKK.

Dibanding tahun lalu, kuota dan realisasi penyaluran pupuk urea sebanyak 6.281 ton yang tersalur 6.224 ton. Sedangkan NPK dari kuota 5.384 ton yang tersalur 5.325 ton lebih. Terkait penambahan kuota pupuk ini, Pihaknya pun sudah melakukan realokasi pupuk tersebut. Ia menambahkan, Persyaratan untuk membeli pupuk, tidak lagi menggunakan kartu tani. Karena semua petani memiliki kartu tani. "Syarat diper-mudah," ujarnya. (her)

Title	Ketegangan Andi Sudi-Andi Iwan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Timur	
Page	8	
Author	Erlan	

Ketegangan Andi Sudi-Andi Iwan

PERTEMUAN Andi Sudirman dan Ketua Gerindra Toraja Utara (Torut) Frederik Victor Palimbong menarik perhatian publik dan pengamat politik karena menunjukkan dinamika politik semakin menarik di Sulsel.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto menilai bahwa posisi Andi Iwan Darmawan Aras sebagai calon potensial dalam di Pilgub Sulsel belum sepenuhnya aman.


Ali menilai bisa saja terjadi pergesekan di internal Partai Gerindra, sehingga bisa

menggoyahkan posisi Andi Iwan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu dianggap memiliki pengaruh sebagai Ketua Gerindra Sulsel.

Namun berpotensi terjadi dinamika politik internal Gerindra di tingkat kabupaten dan kota bisa menjadi ancaman.

Ali Armunanto mencontohkan soal adik Amran Sulaiman, yakni Andi Sudirman baru-baru ini bertemu dengan Ketua Gerindra Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong. **(erlan)**

Title	Ketua Gerindra Torut: Pertemuan Biasa dengan Andi Sudirman	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Timur	
Page	8	
Author	Erlan saputra/sim	

Pilgub Sulsel 2024

Ketua Gerindra Torut: Pertemuan Biasa dengan Andi Sudirman

MAKASSAR, TRIBUN- Ketua Gerindra Toraja Utara (Torut) Frederik Victor Palimbong menanggapi hasil pertemuannya dengan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Pertemuan berlangsung setelah Andi Iwan Darmawan Aras diumumkan sebagai bakal calon Gubernur Sulsel usungan Partai Gerindra.

Frederik Victor menyebutkan bahwa pertemuan tersebut adalah hal biasa.

Apalagi Wabup Torut dan Andi Sudirman itu sama-sama alumni Universitas Hasanuddin.

"Saya sebagai alumni Fakultas Teknik Unhas dan juga bagian dari pemerintah daerah Torut, selama ini kami akrab," kata Frederik Victor usai jilani Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) di kantor PDIP Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar,

Rabu (12/6) jelang malam.

Frederik mengakui selama Andi Sudirman memimpin Provinsi Sulsel, mereka berteman baik.

"Jadi, sejak beliau menjabat sebagai wakil gubernur hingga gubernur, kita terus menjaga hubungan yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Victor menjelaskan Andi Sudirman telah memberikan bantuan keuangan provinsi ke daerah selama tiga tahun berturut-turut.

Hal itu mulai jadi wakil gubernur hingga menggantikan Prof Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel.

"Saya kira pertemuan itu hal biasa, jadi tidak perlu dipolitisir," tambahnya.

Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman bakal calon

Gubernur Sulsel, aktif berkeliling daerah jelang Pilgub Sulsel 2024.

Salah satu tokoh ditemuinya ialah Ketua Gerindra Torut, Frederik Victor Palimbong, pekan lalu.

Pertemuan ini berlangsung setelah DPD Gerindra menetapkan Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) sebagai bakal calon Gubernur Sulsel.

Andi Sudirman Sulaiman mengunggah pertemuannya tersebut di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Andi Sudirman menjelaskan bahwa kunjungan tersebut untuk meninjau salah satu proyek infrastruktur jalan yang dikerjakannya saat menjabat sebagai gubernur.

"Saya kira pertemuan itu hal biasa, jadi tidak perlu dipolitisir," tambahnya.

Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman bakal calon

(erlan saputra/sim)



"Saya kira pertemuan itu hal biasa, jadi tidak perlu dipolitisir."

**FREDERIK VICTOR
PALIMBONG**

Ketua Gerindra Toraja Utara

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pertarungan Dua Mantan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Batam	
Page	1 Part 1	
Author	Robby Patria	

newsanalysis


ROBBY PATRIA
(Pengajar di Umrh Kota
Tanjungpinang)



Pertarungan Dua Mantan

PILKADA Tanjungpinang akan menarik karena bertarungnya dua mantan Wali Kota Tanjungpinang yakni Lis Darman-syah dari PDI Perjuangan ber-hadapan dengan Hj Rahma dari Partai Nasdem-PKS. Rahma dan Lis sebelumnya pernah bertemu di Pilkada 2018 di mana Rahma sebagai wa-kiil Syahrul keluar sebagai pe-menang. Mengulang paket 2018, yakni nasionalis rele-

● ke halaman 7

Title	Pertarungan Dua Mantan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Batam	
Page	1 Part 2	
Author	Robby Patria	

Pertarungan Dua

gius Rahma memilih politisi PKS Riza Hafiz yang dua kali kalah di pemilu legislatif untuk wilayah Provinsi Kepri Dapil Tanjungpinang.

Walaupun kalah suara dari Ismiyati, Riza dipilih Rahma menjadi wakil wali kota dipengaruhi faktor Riza memiliki dukungan dari kalangan kelompok pengajian yang selama ini dia bina.


Sementara Lis belum menentukan siapa yang akan mendampinginya. Ada dua nama yang diprediksi mendampingi Lis yakni Juramadi Efram yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dan Raja Ariza yang pernah menjadi Penjabat Wali Kota Tanjungpinang pada tahun 2018.

Jika Lis ingin mengimbangi

kubu religius, maka pasangan yang tepat adalah Juramadi. Karena Juramadi saat ini memimpin Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjungpinang dan Ketua PCNU Tanjungpinang. Sedangkan Raja lebih diidentifikasi sebagai wakil yang nasionalis sama dengan Lis. Tarik ulur dua nama ini sangat seru karena keduanya memiliki kelebihan untuk mendampingi Lis.

Sedangkan calon tersisa adalah poros Partai Golkar dan Gerindra yang tidak pasti mengusung Ade Angga, Tedy Jun ataupun Dewi Kumalasari, istri H Ansar Ahmad. Jika Partai Golkar tidak mengusung calon maka Pilkada Tanjungpinang akan berhadapan head to head antara dua mantan wali kota yang pernah satu partai yakni PDI Perjuangan. (*)

Sambungan Hal.1

Title	Petugas Sasar 120 Lapak Penjual Hewan Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Warta Kota	
Page	8	
Author	M30/m38	



IBU-IBU NGAKU MALAIKAT
MINTA DUIT KE WARGA,
ANCAM ROBOHKAN RUMAH
PAKAI KEKUATAN

CEK KESEHATAN — Petugas Dinas ketahanan Pangan, peternakan, dan perikanan Kota Tangsel gencar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduadha, Kamis (14/6/2024).

Petugas Sasar 120 Lapak Penjual Hewan Kurban

► Gencar Pemeriksaan Kesehatan Ternak

Tangerang, Warta Kota

Menjelang Iduladha 2024, Kepala Puskesmaswan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3P) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pipit Surya Yuniar, melakukan upaya pemeriksaan hewan kurban.

Pemeriksaan ini dilakukan agar hewan yang dijadikan kurban nantinya dipastikan sehat dan tidak ada penyakit menular.

"Jadi pemeriksaan ini rutin kita lakukan setiap tahun, kita sampai sejauh ini sudah sekitar 120 lapak yang sudah kita periksa," kata Pipit di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (13/6/2024).

Pipit Surya Yuniar mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 7.500 ternak yang terdapat sapi, kambing, hingga kerbau.

"Sebelumnya, itu sudah data ada 7.500-an ternak yang sudah kita periksa, itu ada sekitar 2000-an sapi sisanya kambing domba dan kerbau," ujar Pipit.

Pipit mengatakan, selama pemeriksaan pihaknya belum menemukan penyakit-penyakit yang harus diwaspadai pada hewan di Tangsel.

"Sejauh pemeriksaan itu, belum ada atau tidak ada penyakit-penyakit yang harus kita waspadai (PMK dan Lsd)," ungkap Pipit.

Sebelumnya, Pipit Surya Yuniar mengatakan sudah melakukan banyak yang dilakukan untuk pengawasan berbagai penyakit.

"Pertama untuk antisipasi berbagai penyakit kita sudah dari tahun ke tahun

lakukan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan sudah lakukan vaksinasi," kata Pipit.

Meskipun Vaksin sudah dilakukan di pusat, namun pihaknya tetap melakukan pengecekan agar tak ada kasus hewan kurban yang sakit. "Kita tetap kontrol supaya nol kasus di Tangsel," ujar Pipit.

Soal hewan yang masuk ke Tangsel, pemohon harus mengajukan berkas permohonan sebelum mengirim hewan ke Kota Tangerang Selatan. "Pemohon bisa mengajukan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian pertanian," ucapnya.

Kata Pipit, jika pemohon mengajukan permohonan telah disetujui, maka hewan kurban dari luar daerah baru bisa dikirim ke Tangsel. "Jadi mau mengajukan ke Tangsel, kita mempersyaratkan sudah di vaksin PMK berapa kali, dan pihak pengajuan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan yang sudah disesuaiakan dengan persyaratan kita," ujarnya

Gandeng IPB

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (KP3) Kota Depok melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah.

Pengawasan hewan kurban tersebut dilakukan bersama mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) - Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dokter hewan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Pemeriksaan hewan kurban dilakukan di lapak, peternakan dan tempat penjualan hewan kurban sejak Jumat (7/6/2024).


Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas KP3 Kota Depok, Dede Zuraida menjelaskan, pengawasan ini mencakup kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan pengawasan lalu lintas hewan kurban.

Selain itu, Dinas KP3 Kota Depok juga memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan terkait rekomendasi dan persetujuan tempat berjualan serta tempat pemotongan hewan kurban.

"Data 7 Juni 2024, terdapat 21 lapak dengan total hewan kurban sebanyak 1.501. Dengan rincian 659 sapi, 620 kambing dan 222 ekor domba," kata Zuraida.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kelainan pada hewan kurban seperti lima ekor sapi belum cukup umur (BCU), satu ekor sapi kurus, satu ekor kambing cacat, dua ekor kambing BCU, dua ekor kambing penyakit mulut kuku (PMK), dua ekor kambing sakit mata dan satu ekor domba ORF atau dermatitis pustularis contagiosa.

"Kami langsung ambil tindakan hewan-hewan yang sakit diminta untuk diisolasi dari hewan yang sehat," ungkapnya. "Sedangkan konsumen dihimbau untuk memilih hewan yang memenuhi syarat kesehatan dan syar'i," pungkasnya. (m30/m38)

Title	Satgas Pangan Pantau Penyaluran dan Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	2	
Author	Cem	



(Suara NTB/cem)

HEWAN KURBAN - Satgas Pangan Kota Mataram mengecek kesehatan hewan kurban di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga pada Kamis (13/6).

Satgas Pangan Pantau Penyaluran dan Harga Pangan

Mataram (Suara NTB) -

Satgas Pangan Kota Mataram melakukan pemantauan penyaluran dan harga pangan. Tujuannya memastikan distribusi serta keterjangkauan harga.

Satgas Pangan terdiri dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Polresta Mataram, Kodim 1606 Mataram dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram melakukan pemantauan distribusi penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram. Tim melanjutkan pemantauan harga daging di Pasar Pagesangan dan pengawasan

hewan kurban di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Faesal Abdussamad menjelaskan, Satgas Pangan Kota Mataram turun melakukan pemantauan distribusi dan harga merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional dan Pelaku Usaha Hewan Ternak seluruh Indonesia pada Selasa (11/6).

Pihaknya melakukan pengawasan penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mat-

aram dengan jumlah penerima bantuan 1.296 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 12.960 kilogram beras. Sementara, secara keseluruhan penerima bantuan beras di Kota Mataram sebanyak 38.203 KPM.

Penyaluran beras tahap II alokasi bulan Mei diharapkan dapat meringankan kebutuhan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

Selain mengecek pendistribusian bantuan beras lanjutnya, Satgas Pangan juga mengecek harga dan stok pangan. Komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah, ayam boiler. Sementara, bawang merah dan berbagai

jenis cabai stabil. "Daging sapi relatif stabil," sebutnya.

Pengawasan hewan kurban hanya untuk memastikan tidak ada ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sementara itu, Dokter Hewan pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Drh. M. Irfan menyampaikan, dari hasil pemeriksaan di sejumlah peternak maupun pedagang hewan kurban, sebagian besar hewan kurban di Kota Mataram dinyatakan sehat dan layak untuk dikurban. "Kita sudah melakukan pengawasan dari hulu ke hilir," katanya.


Irfan menjelaskan cara mengecek kondisi kesehatan

hewan serta layak atau tidak untuk dikurban. Pertama, masyarakat bisa melihat dari giginya, apakah telah tanggal atau tidak. Syarat ternak untuk dikurban adalah cukup umur. Kedua, dilihat dari kondisi fisik. Artinya, tidak ada cacat fisik, mata jernih, mulut bersih dan lain sebagainya.

Ia bersyukur pedagang maupun peternak di Kota Mataram, memahami kondisi tersebut sehingga memudahkan untuk proses pemeriksaan. "Kalau hewan ternak yang belum cukup umur disarankan dijual untuk kebutuhan yang lain saja, bukan untuk berkurban," demikian kata dia. (cem)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Siapkan Strategi Ancaman Musim Kemarau	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Warta Kota	
Page	5	
Author	M28	

Andi Amran Sulaiman

Siapkan Strategi Ancaman Musim Kemarau

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) RI angkat suara perihal prediksi akan meroketnya harga beras pada Juli 2024 bulan depan.

Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) produksi beras akan menurun dalam enam bulan terakhir lantaran memasuki musim kemarau satu hingga dua bulan ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, alasan diperkirakan melonjaknya harga beras tersebut lantaran musim panas dan fenomena El Nino yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan.

"Memang sekarang ini kekeringan dan El Nino itu (waktunya) bersamaan, maka mungkin dampaknya seperti itu," ujar Andi saat diwawancarai awak media di Kampus Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia atau PEPI, Rabu (12/6/2024).

Guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan ataupun penurunan stok ketersediaan beras di masyarakat, Kementan RI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Mulai dari mempercepat jadwal penanaman, pompanisasi, hingga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan suplai produksi beras di masyarakat luas.

Metode dan pola tersebut akan dimasifkan kepada para petani secara serentak di Tanah Air demi menghindari kelangkaan konsumsi utama masyarakat Indonesia itu.

"Langkah yang akan kami lakukan ialah pompanisasi bibit benih yang bisa beradaptasi dengan kekeringan,

kemudian percepatan tanam yang dikombinasikan dengan alat mesin pertanian," kata dia.

"Metode itu yang akan kami pilih karena memang solusi tercepat memitigasi dampak dari kekeringan nanti, jadi para petani yang biasa panen hanya satu kali bisa menjadi tiga kali," sambungnya.

Kendati demikian Amran mengaku, peredaran harga beras di pasaran masih dalam kondisi normal ataupun stabil.

Pasalnya pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi atau HET yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras.

Dalam ketentuan tersebut, HET beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kilogram menjadi Rp 14.900 per kilogram.

Tidak hanya beras premium saja, HET untuk kategori beras medium juga direlaksasi dari sebelumnya Rp 10.900 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram.

"Kalau sekarang kan harga beras relatif stabil, karena biarlah petaninya untung supaya konsumennya tersenyum," tuturnya

Menurut Amran, pihaknya tidak akan menaikkan harga beras dalam waktu dekat menjelang Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah.

"Karena jika harganya terlalu ditekan nanti petaninya berteriak, tapi kalau harganya terlalu tinggi nanti konsumennya berteriak, maka kami ambil jalan tengah lewat penetapan HET itu," terang Andi. **(m28)**



Gilbert Sem Sandro

Title	Jaga Stabilitas Harga Kerahkan Kios Pangan
Date	14 Juni 2024
Media	Sriwijaya Post
Page	5
Author	Ean



Kementerian Pertanian

Jaga Stabilitas Harga Kerahkan Kios Pangan

LAHAT, SRIPO – Berbagai strategis digunakan Pemkab Lahat untuk mengendalikan inflasi dan deflasi sektor pangan. Salah satunya menjalankan program Kios Pangan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional. Kios Pangan sendiri merupakan toko yang menjual pangan di tengah masyarakat, dengan harga di bawah harga pasar. Untuk mengenalkan Kios Pangan ini, Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Lahat mulai mensosialisasikan kepada sejumlah pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah menjadi mitra.

Badan Ketahanan Pangan optimis strategis ini akan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Lahat jadi terbangun. "Program ini masih dalam kerangka menjaga inflasi pangan sesuai rencana pemerintah," kata Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Lahat, Alfatah Dwi Putra, Kamis (13/7/2024).


Dikatakan, keberadaan Kios Pangan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah, dalam memberikan kemudahan aksesibilitas

pangan yang terjangkau bagi masyarakat. "Tujuan adanya Kios Pangan ini, agar masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau, dibawah harga pasar," ujar Al Fatah, Kamis (13/6/2024).

Selain menawarkan pemilik RPK ikut program ini, Al Fatah menyebut, rencananya kedepan bisa terbentuk adanya Kios Pangan dibawah naungan Pemkab Lahat. Dengan harapan, kios pangan tersebut bisa jadi embrionya BUMD pangan di Kabupaten Lahat.

"Rencana itu masih dalam penyusunan. Tapi kita menargetkan, bisa launching di Desember mendatang. Nantinya, komoditi pangan disuplay langsung oleh petani, peternak dan pelaku pangan asli dari Kabupaten Lahat," katanya.

Al Fatah menambahkan, program Kios Pangan ini, selain untuk menjaga inflasi juga akan memberikan manfaat ke masyarakat Lahat, karena menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau. (ean)

Title	Produksi Beras Diprediksi Kurang	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Lampung	
Page	2	
Author	Tribunnetwork	

Produksi Beras Diprediksi Kurang

- Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah
- Bulog Diminta Jaga CBP

JAKARTA, TRIBUN - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi produksi beras tahun ini kurang dari 5 juta ton.

Prediksi itu seiring dengan adanya defisit produksi beras pada periode Januari-Juli 2024 yang mencapai 2,6 juta ton. Sementara pada semester II/2024 produksi diprediksi beras diprediksi terus tergerus. "Kalau diskusi saya dengan Pak Menteri Pertanian memproyeksikan sekitar 5 juta ton (kekurangan produksi beras). Dilihat dari grafik dan pattern di semester kedua memang agak berat produksinya," ujar Arief dikutip dari Kontan, Kamis (13/6).

Arief belum bisa berspekulasi ihwal penambahan impor dari kuota yang telah ditetapkan yaitu 3,6 juta ton di tahun ini. Menurut dia, Bapanas bersama dengan Kementerian Pertanian berupaya menutupi kekurangan ini dengan peningkatan produksi dalam negeri. Beberapa langkah yang sudah dilakukan seperti penambahan alokasi pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton termasuk peningkatan pompansasi.

"Sekarang saja dari 3,6

Beras

- Bapanas memprediksi produksi beras tahun ini kurang dari 5 juta ton.
- Penambahan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton.
- Bulog diminta menjaga stok CBP bisa stabil di atas 1 juta ton.
- Bapanas belum bisa berspekulasi ihwal penambahan impor beras.

juta ton (kuota impor), kita masih pelan-pelan, baru 2 juta ton. Nanti kalau diperlukan, tapi kita usahakan dalam negeri. Sayang 3 juta ton impor itu Rp 30 triliun (mengalir ke petani luar negeri)," ucapnya. Di lain sisi, Arief menugaskan kepada Bulog untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa stabil di atas 1 juta ton untuk memastikan kebijakan intervensi harga dan pasokan berjalan.

"Sekarang posisinya CBP sudah 1,7 dan itu sudah termasuk untuk kebutuhan bulanan 220 ton untuk bantuan pangan, ini rekor," imbuhnya. Sementara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisna-

murthi menyebut, realisasi impor beras hingga saat ini telah mencapai 2 juta ton dari beras 3,6 juta ton tahun ini. Adapun sebagian besar beras impor tersebut didatangkan dari Vietnam, Thailand dan Pakistan.

Terkait akuisisi, Bayu menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penambahan kuota impor. Pada sidang kabinet terakhir impor tetap ditinjau 3,6 juta ton sesuai dengan penugasan awal tahun lalu. "Kalau cukup pengadaaan dalam negeri sisanya tidak impor," jelas Bayu. Ia optimistis rencana ini bisa direalisasikan, mengingat Bulog telah melakukan kerjasama perdagangan beras dengan Kamboja sejak tahun 2023 melalui skema business to business (B2B) maupun Government to Government (G2G).

Ihwal rencana akuisisi, Bulog juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional. Hanya saja Bayu tidak menyebut berapa nilai anggaran yang disiapkan. "Intinya, kami juga melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," pungkaskannya. (tribunnetwork)




SURYA/PURNIMANTO

BERAS - Pedagang beras menata beras jenis medium di pertokoan Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi produksi beras tahun ini kurang dari 5 juta ton.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	DKP3 Depok Temukan Hewan Kurban Sakit	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Jakarta Raya	
Page	5	
Author	Jr	

DKP3 Depok Temukan Hewan Kurban Sakit

JAKARTA RAYA - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok mengimbau kepada pedagang hewan kurban untuk tidak menjual hewan yang tidak memenuhi unsur kesehatan.

"Saat pemeriksaan hewan kurban kami menemukan adanya beberapa kelainan pada hewan kurban," ujar Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DKP3 Kota Depok Dede Zuraida, dikutip Kamis (13/6).

Menurut Dede, kelainan yang ditemukan terdiri dari lima sapi belum cukup umur, satu sapi kurus, satu kambing cacat, dua kambing belum cukup umum, dua kambing kena Penyakit Mulut Kuku (PMK), dua kambing sakit mata, dan



DKP3 Depok melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.

satu domba ORF atau Dermatitis Pustularis Contagiosa.

"Kami langsung ambil tindakan hewan-hewan yang sakit dan diminta untuk diisolasi dari hewan yang sehat," jelasnya.

Dengan temuan tersebut, ia mengimbau kepada konsumen untuk memilih hewan yang memenuhi syarat kesehatan yang telah ditentukan dan syariat.

Dede Zuraida mengatakan pihaknya bersama maha-

siswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) - Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dokter hewan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI


melakukan pemeriksaan hewan kurban.

"Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup persyaratan hewan kurban, seperti kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan pengawasan lalu lintas hewan kurban," katanya.

Selain itu DKP3 Kota Depok juga memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan terkait rekomendasi dan persetujuan tempat berjualan serta tempat pemotongan hewan kurban.

"Data 7 Juni 2024 terdapat 21 lapak dengan total hewan kurban sebanyak 1.501. Dengan rincian 659 sapi, 620 kambing, dan 222 ekor domba," tambahnya.

(jr)

Title	Langka dan Hanya Tumbuh di Kompleks Keraton Yogya	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Tribun Jogja	
Page	5	
Author	Azka Ramadhan/Ardhi ke Indah	

Mangga Semar dan Cempuro Raih Sertifikasi Varietas Lokal dari Kementerian Pertanian

Langka dan Hanya Tumbuh di Kompleks Keraton Yogya



Yogyakarta punya dua varietas mangga yang terbilang istimewa dan telah mendapat sertifikasi varietas lokal dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dua mangga itu hanya tumbuh di kompleks Keraton Yogyakarta.

Mangga Semar dan Cempuro adalah dua varietas lokal dari Yogyakarta dan dipas-tikan tidak ada di daerah lainnya di segala penjuru Tanah Air. Jika dilihat dari tekstur buahnya, Semar dan Cempuro ini tampak berbeda dengan mangga pada umumnya, di mana bentuknya cenderung bulat, lebih kecil dan rasanya disebut sangat manis. Sementara, bentuk daun dari kedua varietas itu pun berbeda, karena lebih ramping, dengan ranting yang tegak ke atas.

"Buahnya itu walaupun matang warnanya tetap hijau dan konon rasanya sangat manis, karena enggak ada serat-seratnya. Saya katakan konon, karena saya belum mencicipi. Kemudian, cabangnya membentuk sudut 90 derajat dan daunnya kecil-kecil, sementara kalau harumanis misalnya, itu besar-besar dan hijau tua," tandas Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya, Sukidi, Rabu (12/6).

Ia pun menyampaikan, bahwa pengajuan varietas lokal untuk mendapat sertifikasi sudah dilakukannya sejak beberapa tahun lalu. Sebelumnya, pihaknya pun sudah mengirim petugas untuk mengambil sampel dan pengecekan secara keseluruhan pada tanaman mangga tersebut.

"Penamaan dua buah mangga itu dilakukan langsung oleh Ngarsa Dalem (Sri Sultan Hamengku Buwono X). Pengajuan sertifikasi kami proses sejak tiga tahun lalu, tapi baru terbit kali ini. Kami serahkan sertifikasinya ke pihak keraton," katanya.

Dengan statusnya yang cenderung langka dan tidak dijumpai di daerah lain, Pemkot Yogya bakal segera melakukan penanaman massal. Namun, lanjut Sukidi, untuk saat ini, pihak Kraton Ngayogyakarta belum mengizinkan penanaman oleh masyarakat umum, sehingga harus dicari lahan khusus untuk melestarikan dua varietas tersebut.


"Bibit itu rencananya akan ditanam di lahan Sultan Ground di Bambangpuro, Bantul," ungkapnya.

Kementan RI telah menyerahkan tanda daftar varietas (TDV) mangga Cempuro dan Semar kepada Sekda DIY Beny Suharsono saat Gelar Potensi Pertanian (GPP) 2024 di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (12/6). Plh Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, M. Taufik Ratule, mengatakan bahwa sesuai diadartakan, kedua varietas tersebut nantinya akan segera dirilis dan dipublikasi melalui Direktorat Jenderal Hortikultura.

Menurut Taufik, pendaftaran varietas lokal sudah sejalan dengan program yang dicanangkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan berbagai produksi nasional guna mengantisipasi cuaca ekstrem yang dapat menurunkan produksi dan juga berdampak pada kelaparan. **(Azka Ramadhan/Ardhi-ke Indah)**

DOK. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYA

EKSPLORASI - Petugas Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya saat melakukan eksplorasi varietas mangga Cempuro dan Semar di kompleks Keraton Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Title	Mentan-Mendagri Bersinergi Tingkatkan Ootimasi Pompanisasi Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Merapi	
Page	8	
Author	Antara	

Mentan-Mendagri Bersinergi Tingkatkan Optimasi Pompanisasi Pertanian

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersinergi dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui optimasi pompanisasi demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia.



ANTARA/Harianto

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kanan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri), melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Perluasan Areal Tanam, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

"Solusi cepat yang ditawarkan saat ini untuk meningkatkan pertanian adalah dengan optimasi pompanisasi di lahan-lahan pertanian," kata Mentan, dalam Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Mendagri, di Jakarta, Jumat.

Amran mengaku optimistis apabila program tersebut dijalankan, maka Indonesia dapat mewujudkan swasembada bahkan juga bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Ingat saat ini ada banyak negara yang mengalami penurunan produksi dan ada banyak penduduk dunia yang menderita kelaparan. Karena itu harus kita mitigasi dengan solusi cepat berupa optimasi melalui pompanisasi," katanya.

Dia menyebutkan kebijakan jangka

pendek Kementan menuju swasembada, di antaranya adalah optimasi lahan rawa 400 ribu hektare, pompanisasi sawah 1 juta hektare dan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern seluas 250 ribu hektare di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bersyukur pertanian Indonesia saat ini dipimpin Mentan Andi Amran Sulaiman yang juga pelopor terwujudnya swasembada pangan.

Tito mengaku kagum karena Amran memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam mencapai kemandirian pangan.

"Yang saya tahu, di zaman Pak Jokowi swasembada itu bermula di tangan beliau (Andi Amran Sulaiman, Red). Dan sekarang semangat beliau kembali menggelora," ujar Tito.

Tito mengatakan semangat Mentan Amran dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sangatlah mungkin untuk segera terwujud, mengingat saat ini angkatan kerja yang ada merupakan angkatan kerja terbesar di dunia.

Di samping itu, potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, sehingga upaya perluasan areal tanam atau PAT sangatlah tepat.

"Nah kita sangat gembira karena kita memang harus menuju ke sana (lumbung pangan dunia). Jadi saya mendukung apa pun argumennya untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai negara dominan. Dan dari semua itu food adalah yang paling utama. Kenapa yang lain bisa ditahan tapi pangan tidak," katanya lagi.


Di tangan Mentan Amran, kata Tito, keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada dapat diwujudkan dalam waktu cepat. Sebab, apabila sebuah negara berbicara perekonomian, maka di dalamnya pasti berbicara produksi dan pertanian.

"Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara terbesar di dunia. Ini sangat mungkin terjadi karena kalau kita bicara ekonomi kita pasti bicara produksi dan pangan. Jadi siapa yang mampu membanjiri produksi, maka dia akan menguasai dunia," katanya.

Mengenai hal ini, Tito juga mendukung keterlibatan militer dalam memperkuat program pertanian. Menurut Tito, militer dan pertanian adalah satu kesatuan yang bisa memperkuat pertahanan.

"Saya mendukung TNI terlibat langsung pada program pertanian, karena dalam pertahanan juga ada pertanian. Oleh karenanya kita perlu kebersamaan baik pemerintah daerah maupun pusat. Ingat, untuk menuju negara dominan kita harus membanjiri produksi," ujar Tito pula.

(ANTARA)

Title	Petani Gunungkidul Diajak Bertransformasi	 Kementerian Pertanian
Date	14 Juni 2024	
Media	Harian Jogja	
Page	9	
Author	Harian Jogja	

TEKNOLOGI PATBO SUPER

Petani Gunungkidul Diajak Bertransformasi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY berkolaborasi dengan Komisi D DPRD DIY menggelar bedah buku berjudul *Budi Daya Padi di Lahan Tadah Hujan dengan Teknologi Patbo Super* di Pedukuhan Kemorosari II, Kalurahan Piyaman, Wonosari, Kamis (13/6).

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Imam Taufik, mengatakan warga di Gunungkidul banyak yang terjun di dunia pertanian sejak lama. Sistem pertanian mereka masih bersifat tradisional yang diturunkan sejak zaman dahulu. Sistem pertanian ini perlu diperbarui menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian seperti padi.

"Perlu inovasi dalam proses pembibitan, pengolahan, dan seterusnya. Kami ingin petani Gunungkidul jadi petani pembelajar," kata Imam di Pedukuhan Kemorosari II, Kamis.

Imam menjelaskan transformasi sistem pertanian semakin mendesak dilakukan di Gunungkidul, karena mayoritas lahan pertanian di Bumi Handayani adalah sawah tadah hujan yang memiliki tantangan dalam irigasi. Teknologi Patbo Super dapat menyalahi tantangan ini.

Tantangan lain sebelum masuk dalam penerapan teknologi adalah mengubah pola pikir petani tradisional untuk mau berinovasi. Imam menyarankan pembuatan *demonstration plot* (demplot). Apabila demplot berhasil, petani lain pasti mengikuti. Percontohan ini efektif untuk mendorong petani agar mau bertransformasi.

Ketua Pembina Kontak Tani Nelayan Andalan Gunungkidul, Mujiyana, mengatakan prinsip teknologi patbo super adalah pemakaian pupuk organik tanpa pembakaran dan optimalisasi air melalui penampungan air.

Mujiyana dan sejumlah petani di Gunungkidul sempat mencoba menerapkan teknologi itu. Apabila berhasil, dapat menjadi contoh bagi petani lain seperti di Kalurahan Piyaman. "Lahan kering harus menggunakan teknologi tepat guna," kata Mujiyana.

Pustakawan Ahli Muda DPAD DIY, Hardi Nugroho, mengatakan jawatannya menginventarisasi dan mengidentifikasi data selama beberapa kali bedah buku. Hasil itu nantinya menjadi semacam data untuk mendorong minat baca masyarakat. "Dengan membaca, masyarakat dapat dekat dengan pengetahuan dan bisa berkarya. Jadi bisa berdaya dari sisi ekonomi dan sosial," kata Hardi.

Hardi menambahkan masyarakat Gunungkidul memiliki gairah membaca tinggi. Namun, mereka terkendala akses tempat membaca. Sebab itu, DPAD ke depan berencana memberikan stimulus dalam wujud hibah fisik atau pengadaan seperti komputer dan jaringan Internet. (BC)



Andreas Yuda Pramono

Bedah buku berjudul *Budi Daya Padi di Lahan Tadah Hujan dengan Teknologi Patbo Super* di Pedukuhan Kemorosari II, Kalurahan Piyaman, Wonosari, Kamis (13/6).